

FINTECH UPDATE

EDISI APRIL - JUNI 2026



MENATA ARSITEKTUR FINTECH DAN EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL MASA DEPAN BERBASIS TATA KELOLA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

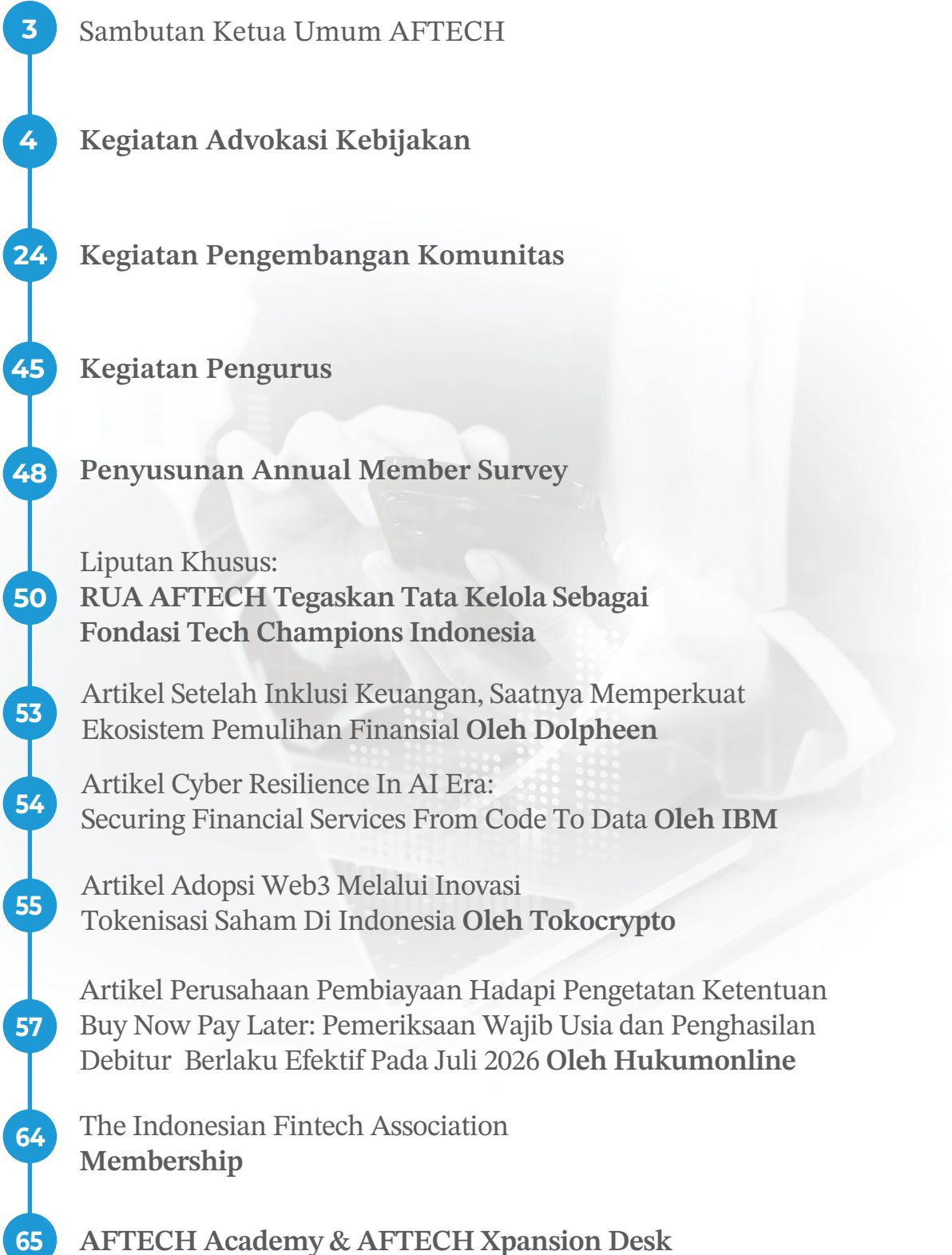
AFTECH MEMPERKUAT LITERASI KEUANGAN DIGITAL GENERASI MUDA MELALUI EDUKASI FINTECH, PELINDUNGAN KONSUMEN, DAN TRANSAKSI DIGITAL AMAN.

RUA AFTECH MENEGASKAN TATA KELOLA DAN KEPERCAYAAN SEBAGAI FONDASI UNTUK MELAHIRKAN TECH CHAMPIONS INDONESIA.

AFTECH MENDORONG HARMONISASI REGULASI ASET KEUANGAN DIGITAL MELALUI KAJIAN KLASIFIKASI PERTAMA DI INDONESIA SEBAGAI FONDASI PENGEMBANGAN TOKENISASI YANG SEHAT, KREDIBEL, DAN DIPERCAYA PASAR.

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

- 
- 3 Sambutan Ketua Umum AFTECH
 - 4 Kegiatan Advokasi Kebijakan
 - 24 Kegiatan Pengembangan Komunitas
 - 45 Kegiatan Pengurus
 - 48 Penyusunan Annual Member Survey
 - 50 Liputan Khusus:
RUA AFTECH Tegaskan Tata Kelola Sebagai
Fondasi Tech Champions Indonesia
 - 53 Artikel Setelah Inklusi Keuangan, Saatnya Memperkuat
Ekosistem Pemulihan Finansial Oleh **Dolpheen**
 - 54 Artikel Cyber Resilience In AI Era:
Securing Financial Services From Code To Data Oleh **IBM**
 - 55 Artikel Adopsi Web3 Melalui Inovasi
Tokenisasi Saham Di Indonesia Oleh **Tokocrypto**
 - 57 Artikel Perusahaan Pembiayaan Hadapi Pengetatan Ketentuan
Buy Now Pay Later: Pemeriksaan Wajib Usia dan Penghasilan
Debitur Berlaku Efektif Pada Juli 2026 Oleh **Hukumonline**
 - 64 The Indonesian Fintech Association
Membership
 - 65 AFTECH Academy & AFTECH Xpansion Desk

SAMBUTAN KETUA UMUM

Asosiasi Fintech Indonesia

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Rekan-rekan anggota AFTECH, serta seluruh mitra industri fintech Indonesia,

Industri fintech Indonesia sedang memasuki babak yang lebih matang. Setelah lebih dari satu dekade tumbuh, berinovasi, dan memperluas akses layanan keuangan digital, tantangan kita hari ini bukan hanya tentang bagaimana tumbuh lebih cepat. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan itu dibangun di atas tata kelola yang kuat, kepercayaan publik, dan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

Ini adalah semangat yang kami tegaskan dalam Rapat Umum Anggota AFTECH 2026. Indonesia membutuhkan lebih banyak tech champions, tetapi tech champions hanya dapat lahir dari ekosistem yang sehat. Inovasi yang bertanggung jawab dan tata kelola yang baik bukan penghambat pertumbuhan. Keduanya justru menjadi fondasi agar industri fintech dapat terus berkembang, dipercaya, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Edisi ini merangkum berbagai langkah AFTECH dalam memperkuat fondasi tersebut. Dari konsolidasi organisasi melalui RUA, penguatan literasi keuangan digital bagi generasi muda di Solo, hingga peluncuran industry consultative paper mengenai klasifikasi aset keuangan digital, seluruh agenda ini mencerminkan satu arah yang sama: membangun industri fintech yang lebih terintegrasi, lebih kredibel, dan lebih dekat dengan kebutuhan sektor riil.

Kami juga melihat bahwa masa depan fintech tidak bisa dibangun secara terpisah-pisah. Kolaborasi antara pelaku industri, regulator, pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting. Isu seperti perlindungan konsumen, keamanan siber, aset digital, literasi, pembiayaan UMKM, dan pengembangan talenta membutuhkan respons bersama yang lebih cepat dan lebih terarah.

AFTECH akan terus menjalankan perannya sebagai rumah bersama bagi industri fintech di Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa inovasi tetap memiliki ruang untuk tumbuh, sambil terus menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, fintech yang kuat bukan hanya fintech yang berkembang secara teknologi, tetapi juga fintech yang dipercaya, relevan bagi masyarakat, dan mampu memberikan dampak nyata bagi Indonesia.

Selamat membaca newsletter triwulan ini.

Salam hormat,

Pandu Sjahrir

Ketua Umum AFTECH



Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan Perbanas Bahas Kolaborasi Bank dan P2P Lending untuk Perluas Akses Kredit



Akses pembiayaan masih menjadi tantangan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani oleh layanan keuangan formal. Untuk memperkuat peran fintech dalam menjembatani kebutuhan tersebut, AFTECH bersama Perbanas menyelenggarakan diskusi White Paper bertajuk "Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Platform P2P Lending" pada 6 April 2026.

Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari ekosistem perbankan, P2P lending, dan regulator. Hadir dalam forum tersebut Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali, Sekretaris Jenderal Perbanas, Anika Faisal, Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, Ketua Departemen P2P AFTECH, Nucky P. Djatmiko, serta Ketua Bidang Pengembangan Produk Perbanas, Michellina Laksmi Triwardhany. Turut hadir Executive Director AFTECH, Mercy Simorangkir, dan Policy Director AFTECH, Rifki Akbari.

Diskusi menegaskan bahwa hubungan antara perbankan dan P2P lending perlu dipandang sebagai kemitraan yang saling melengkapi. Perbankan memiliki kapasitas likuiditas dan pengalaman dalam manajemen risiko, sementara P2P lending memiliki kekuatan dalam teknologi, distribusi digital, dan pemanfaatan data alternatif. Model kolaborasi ini semakin relevan karena industri P2P lending telah berkembang dari pola peer-to-peer menuju institutional-to-peer, dengan keterlibatan lembaga keuangan sebagai mitra pendanaan.

P2P lending juga dinilai dapat berperan sebagai pintu masuk bagi calon debitur yang belum memiliki akses ke perbankan. Melalui rekam jejak pembayaran dan data transaksi, pelaku usaha dapat membangun profil kredit sebelum naik kelas ke layanan keuangan formal. OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp96,62 triliun per Desember 2025, tumbuh 25,44 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan peran industri yang semakin besar dalam pembiayaan nasional.

Forum juga mencatat sejumlah tantangan, terutama fragmentasi data, kualitas credit operations, pengelolaan risiko, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Integrasi data lintas institusi, termasuk SLIK, data fintech, sistem internal, dan data transaksi digital, dinilai penting untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko. AFTECH akan menindaklanjuti rekomendasi White Paper sebagai bahan posisi industri dalam dialog kebijakan bersama OJK. Asosiasi juga akan mendorong pembentukan working group lintas sektor bersama Perbanas dan regulator untuk memperkuat tata kelola kolaborasi antara bank dan P2P lending.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Himpun Masukan Industri Sistem Pembayaran terkait Implementasi PBI dan PADG PISP



Penataan regulasi sistem pembayaran menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi keuangan digital nasional. AFTECH melalui Departemen Sistem Pembayaran dan Perbankan menyelenggarakan Focus Group Discussion sekaligus Halal Bihalal pada 8 April 2026 untuk menghimpun masukan industri terkait kesiapan implementasi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Forum ini mempertemukan penyelenggara jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur pembayaran, perbankan, dan pelaku industri terkait.

AFTECH memaparkan hasil survei kesiapan industri sebagai dasar diskusi. Sebanyak 69 persen responden menyatakan cukup memahami regulasi secara umum, lebih dari 40 persen masih berada dalam tahap penyesuaian teknis, dan 92 persen menyampaikan kebutuhan akan panduan teknis tertulis yang lebih rinci dari Bank Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa industri membutuhkan ruang dialog yang berkelanjutan agar proses implementasi berjalan dengan lebih jelas dan beragam.

Diskusi membahas sejumlah aspek teknis, termasuk pengisian TIKMI, format SBP dan RBSP, kebutuhan audit internal dan eksternal, penyiapan sumber daya manusia, serta batas kewajiban pendaftaran pihak ketiga. Peserta juga membahas pentingnya menjadikan kepatuhan sebagai agenda manajemen, bukan sekadar sebagai fungsi administratif.



Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 10 Tahun 2025 untuk menata industri sistem pembayaran nasional agar lebih konsolidatif, berdaya tahan, dan selaras dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. PADG Nomor 32 Tahun 2025 kemudian hadir sebagai aturan pelaksana untuk mendukung penataan struktur industri dan reformasi regulasi dalam sistem pembayaran.

AFTECH akan menginisiasi audiensi dengan Bank Indonesia untuk menyampaikan hasil survei dan rangkuman diskusi. Audiensi tersebut diharapkan dapat membuka ruang untuk klarifikasi atas isu utama terkait implementasi dan memperkuat kesiapan industri dalam menjalankan ketentuan sistem pembayaran.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Literasi Keuangan Digital Mahasiswa melalui INFINITY di UNS Solo



Adopsi layanan fintech di kalangan mahasiswa terus meningkat, terutama untuk transaksi harian, investasi, pembayaran digital, paylater, dan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi. AFTECH bersama Bank Indonesia dan OJK Surakarta menyelenggarakan INFINITY Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret pada 10 April 2026 untuk memperkuat literasi keuangan digital pada generasi muda. Program ini mengusung tema Fintech untuk Masa Depan Keuangan Digital, Kenali Manfaat serta Risiko Penggunaannya dengan kampanye Kalau Ragu Stop Dulu.

Kegiatan ini menyasar mahasiswa aktif UNS dengan target sekitar 400 peserta dalam format talkshow interaktif. Hadir Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Anton Daryono; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho; serta Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan LMSt OJK Solo, Heri Santosa.

Narasumber talkshow terdiri dari financial influencer, Olivia Louise, Deputy Direktur DSPK Bank Indonesia, One Yusril Fikar, Business Director Izi Data Indonesia, Ricko Marpaung, dan Head of Business Development Indodax, Felix Jonathan Siregar. Director of Marketing, Communication and Community Development AFTECH, Abynprima Rizki, bertindak sebagai moderator pada sesi kedua.

Data SNLIK 2025 dari OJK menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74 persen, sementara literasi keuangan mencapai 66,46 persen. Kesenjangan ini relevan bagi mahasiswa yang telah aktif menggunakan fintech dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan literasi dibutuhkan agar akses terhadap layanan digital berjalan seiring dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, risiko produk, keamanan data, dan perencanaan keuangan.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menyampaikan bahwa INFINITY dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang relevan bagi generasi muda. Kolaborasi antara regulator, industri, dan institusi pendidikan menjadi kunci untuk membangun ekosistem keuangan digital yang sehat.

Program INFINITY tidak hanya mendorong mahasiswa menjadi pengguna fintech, tetapi juga menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Masukan dari peserta akan digunakan untuk memperkuat materi literasi fintech agar lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Agenda Perlindungan Konsumen bersama OJK PEPK



Pelindungan konsumen menjadi salah satu fondasi penting dalam pertumbuhan industri keuangan digital. AFTECH melaksanakan audiensi perdana dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, pada 13 April 2026 untuk membahas penguatan literasi keuangan digital, edukasi publik, dan tata kelola perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Pertemuan ini menjadi ruang bagi AFTECH untuk menyampaikan sejumlah program yang telah berjalan, termasuk Bulan Fintech Nasional, Indonesia Digital Bank Summit, pengembangan Chat Pindar sebagai kanal edukasi berbasis teknologi, serta keterlibatan aktif dalam Indonesia Anti Scam Centre. AFTECH juga menyampaikan pentingnya memperluas literasi keuangan digital ke luar wilayah yang selama ini menjadi pusat kegiatan edukasi, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali.

Dalam diskusi tersebut, OJK menekankan bahwa pendekatan perlindungan konsumen ke depan perlu lebih bersifat preventif. Industri didorong menjadi garda depan dalam edukasi dan mitigasi risiko, dengan berlandaskan tiga prinsip utama dalam market conduct, yaitu responsible industry, transparency, dan fairness to customers. Prinsip ini menempatkan pelaku industri bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan konsumen memahami produk, biaya, manfaat, dan risikonya.

OJK juga menyoroti tingginya volume pengaduan konsumen yang masuk melalui Indonesia Anti Scam Centre, Contact Center 157, dan Satgas PASTI. Dalam tiga bulan terakhir, laporan yang masuk mencapai sekitar 140 ribu. Skala tersebut menunjukkan bahwa edukasi, deteksi dini, dan respons cepat membutuhkan kerja sama antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan lanjutan dengan OJK PEPK akan membahas standar minimum tata kelola industri yang dapat didorong bersama. Agenda ini menjadi bagian dari upaya membangun layanan fintech yang lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan lebih dipercaya oleh publik.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan OJK IAKD Bahas Roadmap Keuangan Digital hingga 2031



Pengembangan inovasi teknologi di sektor keuangan membutuhkan koordinasi yang konsisten antara regulator dan pelaku industri. AFTECH melaksanakan audiensi perdana dengan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarmo, pada 13 April 2026 untuk membahas arah roadmap sektor IAKD, peluang kolaborasi, serta sinergi dalam mendukung digitalisasi ekonomi dan financial deepening.

AFTECH menyampaikan perannya sebagai asosiasi payung sektor keuangan digital yang menaungi lebih dari 200 anggota dengan cakupan lebih dari 25 model bisnis. Empat pilar pengembangan industri juga dipaparkan sebagai fondasi kerja asosiasi, yaitu public policy, fintech community and collaboration, financial literacy and education, serta knowledge and intelligence.

Sejumlah program strategis turut dibahas, mulai dari School of Heroes, AFTECH Academy, program INFINITY, Expansion Desk untuk mendukung ekspansi internasional anggota, hingga Digital X Real Sector Launchpad yang dikembangkan bersama Bappenas. Program tersebut menunjukkan arah kerja asosiasi dalam menghubungkan inovasi fintech dengan penguatan kapasitas industri, literasi, ekspansi pasar, dan pembiayaan sektor riil.

Dalam diskusi, OJK menegaskan bahwa pengembangan roadmap industri hingga 2031 menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu arah besar yang disampaikan adalah peningkatan rasio investasi terhadap produk domestik bruto dari 25 persen menjadi sekitar 30 persen. Target ini membutuhkan dukungan sektor keuangan digital melalui inovasi produk, perluasan akses, serta instrumen yang mampu menghubungkan likuiditas dengan kebutuhan ekonomi riil.

OJK juga membuka ruang bagi pengembangan tokenisasi aset dan instrumen keuangan digital. Pilot project digitalisasi di sejumlah wilayah direncanakan mulai Mei 2026. Arah ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat ekosistem aset keuangan digital yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kerangka regulasi.

Koordinasi lanjutan difokuskan pada forum komunikasi reguler antara AFTECH dan OJK IAKD. Selain membahas isu strategis, forum tersebut juga digunakan untuk memantau perkembangan perizinan anggota, memetakan model bisnis baru di sektor ITSK, dan menyelaraskan roadmap industri dengan cakrawala perencanaan OJK hingga 2031.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Perkuat Kolaborasi Penanganan Fraud dan Scam Digital



Fraud dan scam digital menjadi isu bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari regulator, asosiasi, pelaku industri, hingga penyedia infrastruktur digital. AFTECH berpartisipasi sebagai pembicara dalam forum kolaboratif ADIGSI bertajuk Selalu Waspada, Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital pada 16 April 2026 untuk membahas penguatan pencegahan, pelaporan, dan respons terhadap penipuan digital.

Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari ekosistem keamanan siber, sektor keuangan digital, regulator, dan industri. Pembahasan berfokus pada peningkatan volume laporan penipuan digital, kebutuhan integrasi sistem pelaporan, serta pentingnya edukasi publik sebagai lini pertahanan pertama bagi konsumen.

Data Indonesia Anti Scam Centre menunjukkan lebih dari 432.637 laporan penipuan digital selama periode November 2024 hingga Januari 2026, dengan total kerugian sekitar Rp9,1 triliun. Volume laporan harian mencapai 700 sampai 800 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan scam tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi juga membutuhkan pencegahan yang lebih terstruktur dan lebih cepat.

OJK melalui IASC juga mencatat bahwa banyak laporan masuk setelah lebih dari 12 jam sejak kejadian, sementara aliran dana korban dapat berpindah dalam hitungan detik. Situasi ini memperkuat kebutuhan akan otomatisasi sistem pelaporan, pengembangan Anti Scam Warning System, integrasi dengan sektor telekomunikasi, serta kerja sama internasional untuk menelusuri pola penipuan lintas batas.

Dalam forum tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar, menyampaikan tiga fokus utama asosiasi dalam penanganan fraud dan scam digital. Fokus tersebut mencakup penguatan sistem internal anggota, partisipasi aktif dalam IASC, serta edukasi publik secara berkelanjutan. Penguatan sistem internal meliputi pedoman keamanan siber, pembentukan CSIRT, serta peningkatan kesiapan anggota dalam mendeteksi dan merespons insiden.

Kolaborasi seperti ini memperkuat posisi industri dalam membangun ekosistem fintech yang aman dan dipercaya oleh publik. Agenda berikutnya diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi, pertukaran informasi ancaman, dan perluasan edukasi agar masyarakat dapat mengenali risiko lebih awal sebelum terjadi kerugian.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan CCAF Luncurkan Kajian Klasifikasi Aset Keuangan Digital



Tokenisasi aset keuangan membuka peluang untuk memperdalam pasar keuangan dan memperluas akses terhadap investasi. AFTECH bersama Cambridge Centre for Alternative Finance meluncurkan Industry Consultative Paper bertajuk "Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia" pada 22 April 2026. Kajian ini menjadi salah satu referensi awal bagi dialog kebijakan mengenai klasifikasi dan pengaturan aset keuangan digital di Indonesia.

Kajian tersebut menyajikan pendekatan multiaspek yang mencakup perspektif hukum, fungsi ekonomi, pengaturan, dan aspek teknis. Tujuannya adalah membantu regulator, industri, dan pemangku kepentingan memahami karakteristik instrumen digital secara lebih terstruktur. Dengan klasifikasi yang lebih jelas, instrumen dengan profil risiko yang serupa dapat memperoleh respons kebijakan yang lebih konsisten.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa klasifikasi aset digital yang jelas menjadi prasyarat agar tokenisasi dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan dipercaya oleh pasar. Pendekatan ini menempatkan industri sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai pihak yang menunggu regulasi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai upaya membangun pemahaman bersama tentang aset keuangan digital. Bank Indonesia menekankan pentingnya inovasi yang tetap menjaga kedaulatan moneter, resiliensi, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarto, juga menyambut baik consultative paper ini sebagai fondasi awal diskusi kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan bersama pelaku usaha, asosiasi, kementerian, dan lembaga terkait.

Salah satu rekomendasi utama dalam kajian ini adalah pembentukan Forum Koordinasi Klasifikasi Aset Keuangan Digital. Forum tersebut dapat menjadi wadah lintas otoritas dan industri yang bersifat permanen, nonadjudikatif, dan terdokumentasi untuk menangani isu klasifikasi instrumen yang beririsan antarrezim pengaturan.

Masukan dari regulator dan peserta diskusi menjadi bahan untuk memperkaya substansi consultative paper. Dialog ini juga menjadi langkah awal untuk mendukung kerangka pengaturan aset keuangan digital yang adaptif, hati-hati, dan sesuai dengan karakter pasar Indonesia.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Ikuti Workshop Keamanan Siber OJK untuk Penguatan Ketahanan IAKD



Kegiatan ini dihadiri oleh Saat Prihartono selaku Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, mewakili AFTECH turut hadir dalam kegiatan workshop keamanan siber yang diselenggarakan OJK dalam mendukung upaya penguatan keamanan siber dan peningkatan ketahanan digital di ekosistem keuangan Indonesia.

Keamanan siber menjadi fondasi penting bagi penyelenggara inovasi teknologi di sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. AFTECH berpartisipasi dalam Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD yang diselenggarakan OJK pada 27 April 2026 untuk membahas penguatan ketahanan siber, kesiapan organisasi, serta kemampuan industri dalam merespons insiden digital.

Workshop ini menekankan bahwa keamanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan manusia dan proses internal. BSSN memperkenalkan konsep human firewall, yaitu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai garis pertahanan pertama dalam menghadapi ancaman siber. Konsep ini relevan bagi sektor keuangan digital karena serangan sering masuk melalui social engineering, pihak ketiga, rantai pasok, dan sistem inti organisasi.

OJK juga mendorong pergeseran pendekatan dari sekadar kepatuhan menuju ketahanan. Penyelenggara IAKD perlu mampu mengantisipasi, merespons, dan pulih dari insiden siber. Dengan demikian, keamanan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari kelangsungan bisnis dan kepercayaan pengguna.

Paparan workshop mencakup berbagai ancaman siber terkini, termasuk malware, serangan DDoS, credential stuffing, Advanced Persistent Threat, serta serangan social engineering yang semakin berkembang dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. BSSN juga mengingatkan potensi risiko quantum computing terhadap sistem kriptografi yang saat ini digunakan dan pentingnya kesiapan menuju post-quantum cryptography.

Sesi tabletop exercise turut diberikan untuk melatih kemampuan analitis dan pengambilan keputusan dalam kondisi krisis siber. Latihan seperti ini membantu organisasi memahami alur koordinasi, pembagian peran, dan prioritas respons saat terjadi insiden.

Bagi anggota AFTECH, materi workshop menjadi masukan untuk memperkuat tim tanggap insiden, menetapkan penanggung jawab keamanan siber, serta mengadopsi kerangka keamanan seperti ISO 27001 dan NIST. Kolaborasi industri dalam berbagi informasi ancaman juga perlu diperkuat agar ketahanan ekosistem dapat dibangun bersama.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Expert Lab Bahas Risiko Deepfake dalam Layanan Keuangan Digital



Pemanfaatan kecerdasan artifisial membuka peluang inovasi dalam layanan keuangan, sekaligus menghadirkan risiko baru terhadap keamanan identitas digital. AFTECH menyelenggarakan Expert Lab bertema AI, Risk, and Regulation in Financial Services pada 28 April 2026 untuk membahas tantangan deepfake dalam ekonomi digital Indonesia, terutama dalam proses onboarding, verifikasi identitas, dan perlindungan konsumen.

Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan penyedia teknologi untuk membahas tata kelola AI di sektor jasa keuangan. OJK memaparkan bahwa pedoman tata kelola kecerdasan artifisial yang telah diterbitkan bersifat principle-based dengan tiga prinsip utama, yaitu accountability, human oversight, dan reliability. Prinsip ini perlu diterapkan secara menyeluruh pada aspek people, process, dan technology.

Advance AI menjelaskan bahwa pola serangan siber telah berkembang dari ancaman konvensional menuju eksploitasi deepfake berbasis AI. Serangan seperti face swap dan voice spoofing kini lebih mudah diakses melalui dark web maupun aplikasi umum. Perkembangan ini membuat metode eKYC konvensional semakin perlu diperkuat dengan advanced liveness detection berbasis tiga dimensi.

KORIKA menyoroti pentingnya harmonisasi peta jalan AI lintas kementerian dan lembaga. Harmonisasi tersebut dapat membantu menyatukan arah kebijakan, memperkuat kesiapan infrastruktur data center, dan memastikan strategi pertahanan siber nasional berjalan lebih terkoordinasi. Dari sisi industri, SeaBank menekankan bahwa kontrol keamanan statis perlu dilengkapi dengan edukasi konsumen yang berkelanjutan terhadap teknik social engineering. Diskusi juga menempatkan deepfake sebagai isu yang harus ditangani melalui kombinasi teknologi, regulasi, dan literasi. Deteksi anomali, verifikasi identitas yang lebih kuat, serta pemahaman pengguna menjadi bagian dari strategi pertahanan yang saling melengkapi.

Sebagai tindak lanjut, AFTECH menjajaki penyusunan code of conduct terkait penggunaan AI dan standar liveness detection bagi para anggota. Industri juga didorong untuk mengadopsi Fraud Detection System berbasis AI yang saling terhubung antarpilar transaksi agar respons terhadap anomali dapat dilakukan lebih cepat.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Ikuti Workshop BSSN untuk Penguatan Tanggap Insiden Siber



Kemampuan merespons insiden menjadi ukuran penting dalam ketahanan siber organisasi. AFTECH berpartisipasi dalam Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata 2026 yang diselenggarakan BSSN pada 29 April 2026 untuk memperkuat kapasitas industri dalam menghadapi ancaman siber pada sektor yang termasuk dalam Infrastruktur Informasi Vital nasional.

BSSN menegaskan bahwa ancaman siber saat ini semakin masif, kompleks, dan multidimensi. Motif serangan tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat berhubungan dengan kepentingan geopolitik. Karena itu, pendekatan keamanan perlu bergerak dari kepatuhan formal menuju maturitas implementasi yang lebih terukur..

AFTECH melalui anggota Dewan Etik AFTECH, Pratama Persadha, menyampaikan bahwa ketahanan siber tidak ditentukan oleh klaim bahwa organisasi tidak dapat diretas. Ketahanan justru terlihat dari kecepatan respons, kemampuan mitigasi, dan kapasitas pemulihan bisnis setelah insiden terjadi. Perspektif ini penting bagi fintech karena layanan keuangan digital bergantung pada kepercayaan, kontinuitas layanan, dan keamanan data pengguna.

Workshop juga membahas pemanfaatan Indeks Keamanan Siber sebagai alat self-assessment yang objektif. Melalui pengukuran tersebut, organisasi dapat memahami posisi kematangan keamanan siber masing-masing dan menentukan area yang perlu diperkuat. Pembentukan CSIRT juga dipandang sebagai kebutuhan bisnis, bukan sekadar kewajiban regulatif.

Materi lain mencakup behavior-based security, penguatan security culture, pelatihan berbasis peran, micro learning, gamification, dan case-based learning. Pendekatan ini membantu perusahaan menyampaikan edukasi keamanan dengan cara yang lebih relevan untuk fungsi kerja yang berbeda di dalam organisasi.

Tindak lanjut workshop menekankan pentingnya pembentukan dan pendaftaran CSIRT ke BSSN, penggunaan self-assessment, serta penguatan pengelolaan risiko vendor dan supply chain. AFTECH juga terus menjalankan peran sebagai penghubung antara industri dan regulator dalam menyebarkan praktik terbaik keamanan siber.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Dukung Kolaborasi Indonesia dan Australia dalam Penanganan Scam



Penipuan digital semakin berkembang sebagai kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama antarregulator, industri, penegak hukum, dan sektor privat. AFTECH berpartisipasi dalam Workshop on Scams bersama OJK, Australian Treasury, ACCC, dan ASIC pada 5 sampai 7 Mei 2026 untuk membahas penguatan sistem anti-scam di Indonesia dan pembelajaran dari pengalaman Australia.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, regulator sektor keuangan, aparat penegak hukum, asosiasi industri, perbankan, perusahaan fintech dan sistem pembayaran, serta pemangku kepentingan anti-scam dari Indonesia dan Australia. AFTECH turut hadir dalam kegiatan ini dengan diwakili oleh Wakil Ketua Departemen Aset Kripto AFTECH, Dion Evan.

Workshop ini membahas perkembangan Indonesia Anti Scam Centre yang diluncurkan pada 22 November 2024. OJK menyampaikan bahwa IASC telah menerima lebih dari 540.000 laporan dengan rata-rata 1.300 laporan per hari. Tingginya volume laporan menunjukkan bahwa penipuan digital telah menjadi isu perlindungan konsumen yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.

Forum juga membahas sejumlah tantangan dalam penanganan penipuan di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup lonjakan pengaduan, keterlambatan pelaporan korban, kompleksitas pelacakan dan pemblokiran dana, serta proses pengembalian dana yang masih perlu diperkuat. Banyak korban baru melapor lebih dari 12 jam setelah kejadian, sementara dana hasil penipuan dapat berpindah dalam waktu yang sangat singkat.

OJK memaparkan pendekatan strategis IASC melalui dua jalur. Pertama, pendekatan proaktif yang mencakup edukasi, deteksi, dan disruptasi sebelum kerugian meluas. Kedua, reactive approach yang mencakup pelacakan, pemulihan, dan penegakan hukum setelah kejadian terjadi. Kombinasi dua pendekatan ini penting agar sistem tidak hanya menangani laporan, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya penipuan.

Perwakilan Australia membagikan kerangka penanganan scam yang menekankan pendekatan whole-of-ecosystem. Pendekatan ini mengandalkan pertukaran data lintas sektor, keterlibatan aktif sektor swasta, dan koordinasi yang kuat antara regulator, platform digital, lembaga keuangan, dan penegak hukum.

Bagi AFTECH, pembahasan ini memperkuat relevansi keterlibatan industri fintech dalam IASC. Kolaborasi lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan sistem anti-scam berbasis data dan intelijen, edukasi konsumen, serta pertukaran wawasan antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat perlindungan konsumen digital.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan Jalin Perkuat Kolaborasi Guna Meningkatkan Daya Tahan Industri Fintech Nasional



Fraud digital telah berkembang menjadi risiko ekosistem yang membutuhkan respons lintas institusi secara bersama-sama. AFTECH menyelenggarakan C-Level Gathering and Expert Lab bersama Jalin pada 21 Mei 2026 dengan tema *Protection in Action, Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem* untuk membahas penguatan deteksi fraud, pertukaran pola ancaman, dan kolaborasi industri. Budi Gandasoebrata, WKU II AFTECH turut membuka kegiatan ini.

Forum ini menegaskan bahwa fraud di era digital tidak lagi dapat dilihat sebagai risiko individual di masing-masing perusahaan. Pola serangan semakin terhubung, bergerak cepat, dan memanfaatkan celah antarplatform. Karena itu, respons industri perlu dibangun melalui pendekatan ekosistem yang mampu mendeteksi pola anomali dengan lebih cepat.

OJK menyampaikan bahwa Indonesia Anti Scam Centre hingga Maret 2026 telah menerima lebih dari 515 ribu laporan, mengidentifikasi lebih dari 872 ribu rekening terindikasi fraud, dan memblokir dana sebesar Rp585,4 miliar. Kecepatan respons di bawah 10 menit menjadi faktor penting dalam upaya penyelamatan dana korban.

Diskusi juga menyoroti perubahan pola fraud dari phishing massal menuju targeted scam berbasis kecerdasan buatan. Bentuk serangan seperti social engineering, deep fake video call, synthetic identity, dan transaction laundering semakin membutuhkan kemampuan deteksi yang lebih canggih.

Dalam forum ini, Jalin bersama AFTECH menginisiasi pembangunan Fraud Detection Consortium sebagai infrastruktur kolaboratif berbasis konsensus intelijen. Konsep ini memungkinkan anggota berbagi pola fraud dan model deteksi tanpa membagikan data finansial maupun data pribadi nasabah. Dengan pendekatan tersebut, industri dapat mempercepat deteksi anomali sekaligus menjaga kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.

Fraud Detection Consortium juga menawarkan manfaat cost-sharing infrastruktur dan akses ke teknologi fraud detection yang lebih modern, terutama bagi institusi dengan kapasitas investasi terbatas. Tindak lanjut diarahkan pada demonstrasi teknis FDS Jalin, pendalaman pengalaman implementasi BPC, serta pembahasan framework sharing data dengan regulator agar memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Ikuti KNPED 2026 untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi Daerah



Penguatan ekonomi daerah membutuhkan sinergi antara kebijakan sektor keuangan, pemerintah daerah, dan sektor riil. AFTECH menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 pada 25 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh OJK dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Forum ini membahas peran pembiayaan, penguatan UMKM, dan kolaborasi lintas lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

AFTECH diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar turut menghadiri forum yang dibuka oleh Dewan Komisiner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan kementerian maupun lembaga teknis sektor riil. Sejumlah kepala daerah juga hadir, antara lain Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, serta Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa penguatan pembiayaan dan ekosistem UMKM menjadi fokus utama sektor jasa keuangan. Sejak 2024, OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang diterapkan di 40 kabupaten dan kota. Program ini berfokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Forum ini menekankan pentingnya kerja sama antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan. Sinergi tersebut dibutuhkan agar pembiayaan tidak hanya tersedia, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan sektor riil di daerah. Pendekatan seperti ini penting karena setiap daerah memiliki karakter ekonomi, komoditas unggulan, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda.

Sesi Financial Leaders Talk membahas sinergi kebijakan sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Economic Leaders Forum berfokus pada peningkatan kapasitas sektor riil agar pelaku usaha daerah dapat lebih siap mengakses produk keuangan.

Bagi ekosistem fintech, agenda ini relevan dengan peran layanan keuangan digital dalam memperluas akses terhadap pembiayaan, pembayaran, pencatatan transaksi, dan literasi keuangan di daerah. Fintech dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha lokal dan layanan keuangan formal, terutama bagi UMKM yang membutuhkan proses yang lebih cepat, data yang lebih baik, dan kanal distribusi yang lebih luas.

Kehadiran AFTECH dalam forum ini memperkuat posisi industri fintech sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan daerah. Kolaborasi lintas sektor dapat membuka peluang pemanfaatan fintech untuk memperluas inklusi, mendukung UMKM, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih terukur.

AFTECH Bahas Akses Efek Global melalui Kanal Domestik yang Teregulasi



Akses investor domestik terhadap efek global perlu dikembangkan melalui kanal yang teregulasi agar tetap mendukung perlindungan konsumen dan pengawasan yang efektif. AFTECH melakukan audiensi dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, pada 25 Mei 2026 untuk membahas penguatan daya saing akses efek global bagi investor Indonesia.

Audiensi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum IV AFTECH, Claudia Kolonas, Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar, serta perwakilan anggota, yaitu Ni Putu Kurniasari dari Bareksa dan Gregorius Tampubolon dari Pluang.

Audiensi ini membahas sejumlah isu utama, termasuk perluasan daftar saham dalam skema Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri, akses terhadap IPO global, serta kepastian perlakuan pajak atas efek asing. AFTECH menyampaikan bahwa minat investor ritel terhadap efek global terus meningkat. Jumlah investor yang mengakses efek Amerika Serikat melalui skema PALN naik dari 37.021 investor pada 2022 menjadi 116.905 investor pada 2024. Nilai transaksi bersih juga tumbuh lebih dari lima kali lipat menjadi USD 823 juta.

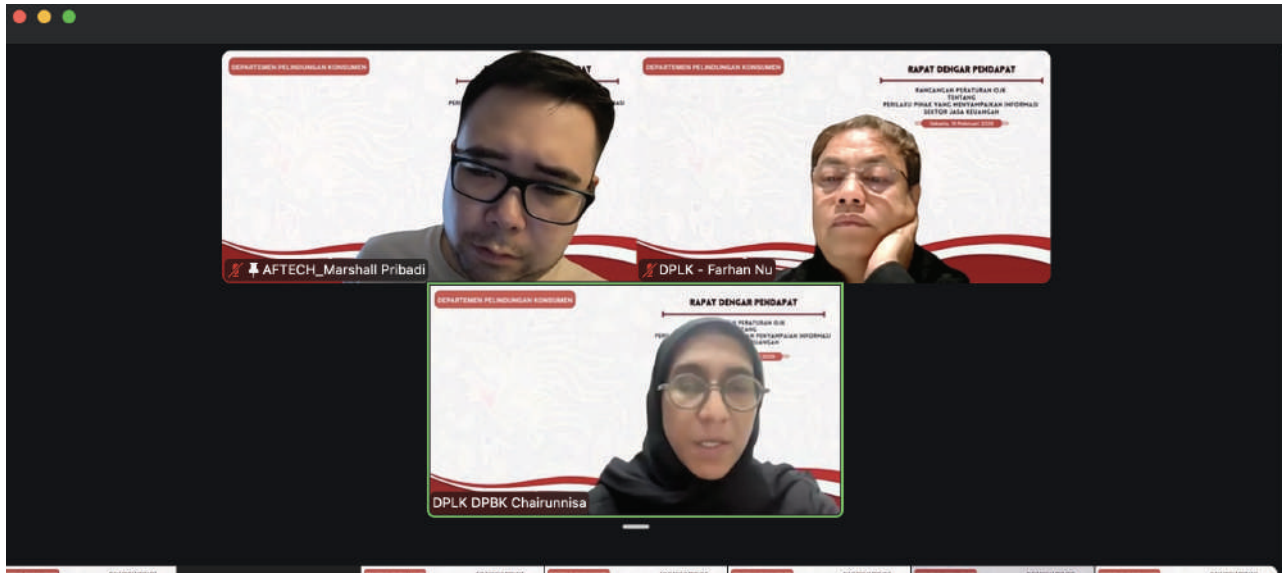
Sejak kewenangan pengaturan berpindah dari Bappebti ke OJK pada 2024, daftar saham dalam skema PALN belum mengalami pembaruan yang signifikan. Kondisi ini dapat memunculkan risiko forced liquidation akibat corporate actions, sekaligus membatasi akses investor terhadap IPO global. Jika pilihan produk domestik terlalu terbatas, investor berpotensi beralih ke platform offshore yang tidak berizin di Indonesia.

AFTECH menekankan bahwa pengembangan kanal domestik justru dapat memperkuat perimeter pengawasan regulator. Dengan akses yang jelas, investor tetap berada dalam ekosistem yang diawasi, sementara regulator memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap transaksi dan perilaku pasar. Dari sisi perpajakan, capital gain efek asing saat ini dikenakan PPh progresif hingga 35 persen. AFTECH mengusulkan penerapan pajak final dengan tarif kompetitif atau mekanisme wajib pungut sebagai solusi untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat traceability transaksi.

OJK menyambut baik engagement ini dan menyampaikan bahwa proses penyempurnaan aturan sedang berjalan. Tindak lanjut diarahkan pada pembahasan teknis terkait PALN, brokerage as a service, mekanisme listing efek asing, serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Beri Masukan atas RPOJK Pengajuan Keberatan Sanksi Sektor Jasa Keuangan



Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum I AFTECH mewakili AFTECH dalam menyampaikan perhatian dan masukan industri atas RPOJK Pengajuan atas keberatan sanksi sektor jasa keuangan terkait pentingnya mekanisme keberatan yang transparan, adil, proporsional, dan konsisten bagi seluruh pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Mekanisme keberatan atas sanksi perlu memiliki proses yang jelas, adil, dan konsisten di seluruh sektor jasa keuangan. AFTECH menghadiri Rapat Dengar Pendapat OJK pada 26 Mei 2026 untuk membahas Rancangan Peraturan OJK tentang Pengajuan Keberatan atas Sanksi di Sektor Jasa Keuangan. Forum ini menghimpun masukan dari asosiasi dan pelaku industri jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dan keuangan digital.

RPOJK ini merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuannya adalah menyelaraskan mekanisme pengajuan keberatan di berbagai sektor jasa keuangan. Cakupannya meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, perlindungan konsumen, keuangan digital, dan konglomerasi keuangan.

Rapat Dengar Pendapat ini diikuti perwakilan dari 38 asosiasi dan lembaga industri jasa keuangan, termasuk AFTECH, BEI, KPEI, KSEI, AFPI, asosiasi asuransi, asosiasi perbankan, dan Himbara. Rapat dipimpin oleh Direktur Senior Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, dengan narasumber Indra Setiawan dan Gentha Wardana.

(Bersambung di halaman berikutnya)



Rancangan aturan ini mengatur beberapa mekanisme utama. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari kalender sejak surat sanksi ditetapkan. Selain itu, terdapat kewajiban pelunasan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 persen sebelum mengajukan keberatan. OJK kemudian menyelesaikan proses keberatan dalam waktu maksimal 40 hari kerja.

Peserta RDP menyoroti sejumlah isu penting. Pertama, independensi unit yang menangani keberatan dari unit yang menerbitkan sanksi. Kedua, kebutuhan untuk memperjelas kriteria informasi baru atau novum. Ketiga, usulan pemendekan service level agreement dari 40 hari menjadi 20 hari kerja. Keempat, kemungkinan diferensiasi SLA berdasarkan tingkat kompleksitas kasus.

Bagi industri fintech, mekanisme keberatan yang jelas penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga fairness dalam proses penegakan aturan. Pengaturan yang baik dapat membantu pelaku usaha memahami hak administratifnya, sekaligus tetap menjaga kewenangan regulator dalam menjalankan pengawasan.

AFTECH menyampaikan tanggapan tertulis kepada OJK sesuai tenggat yang ditetapkan. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses finalisasi peraturan agar mekanisme keberatan dapat berjalan lebih transparan, proporsional, dan konsisten di seluruh sektor jasa keuangan.

AFTECH dan PERBANAS Bahas Perlambatan Kredit UMKM



Pembiayaan UMKM membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara perbankan, fintech, penjaminan, dan pemanfaatan data. AFTECH berpartisipasi dalam Focus Group Discussion PERBANAS pada 2 Juni 2026 bertema Memahami Turunnya Pertumbuhan Kredit UMKM untuk membahas faktor penyebab perlambatan kredit serta peluang memperkuat ekosistem pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Sebagai perwakilan AFTECH, Yonathan Gautama dari Departemen Pindar hadir sebagai narasumber. Forum ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PERBANAS, Anika Faisal, bersama tim riset Perbanas Institute, dan turut menghadirkan perwakilan BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank DKI, Perbanindo, Jamkrindo, serta AIForesee.

Diskusi mengonfirmasi bahwa perlambatan kredit UMKM merupakan fenomena multidimensi. Dari sisi permintaan, banyak pelaku UMKM masih berfokus pada keberlangsungan usaha sehingga belum sepenuhnya berada dalam posisi ekspansi. Dari sisi penawaran, lembaga keuangan memperketat manajemen risiko sebagai respons terhadap peningkatan risiko kredit.

Forum juga mencatat bahwa rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan turun dari sekitar 20 persen sebelum pandemi menjadi 17 persen. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk memperkuat pembiayaan produktif, terutama bagi UMKM yang masih membutuhkan akses modal tetapi belum memiliki data keuangan dan agunan yang memadai.

AFTECH menyampaikan bahwa pinjaman daring legal atau pindar dapat berperan sebagai pelengkap dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Outstanding pembiayaan pindar per Maret 2026 mencapai Rp101,3 triliun dan tumbuh 26,22 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan bahwa fintech memiliki ruang untuk menjangkau segmen yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan.

Namun, peran fintech perlu ditempatkan dalam ekosistem yang lebih terhubung. Open finance, interoperabilitas data, penjaminan yang berkelanjutan, dan kerja sama antara bank dan fintech dapat memperkuat kualitas pembiayaan. Dengan data yang lebih baik, lembaga keuangan dapat menilai risiko secara lebih akurat dan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang memiliki prospek usaha.

Hasil diskusi menjadi bagian dari kajian nasional Perbanas Institute. Bagi AFTECH, rekomendasi forum ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi penguatan ekosistem pembiayaan UMKM bersama regulator, kementerian terkait, dan pelaku industri keuangan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH dan OJK IAKD Bahas Prioritas Perizinan Model Bisnis Keuangan Digital



Pengembangan model bisnis keuangan digital membutuhkan standar perizinan yang jelas agar inovasi dapat berkembang dalam koridor pengawasan yang tepat. AFTECH melakukan audiensi perdana dengan Kepala Departemen Perizinan dan Pengaturan IAKD OJK, Gonthor R Aziz, pada 3 Juni 2026 untuk membahas prioritas model bisnis, penyusunan panduan teknis, serta penguatan dialog reguler antara asosiasi dan regulator.

Audiensi ini turut dihadiri Deputy Komisioner IAKD OJK, Luthfy Zain Fuady, serta tim DPIA dan DPIR OJK. Dari AFTECH, hadir Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, serta Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar.

AFTECH menyampaikan dua agenda utama dalam audiensi ini. Pertama, usulan prioritas empat model bisnis yang telah beroperasi namun belum memiliki standar perizinan yang jelas di bawah IAKD. Keempat model tersebut adalah Earned Wage Access, identitas digital dan tanda tangan elektronik, financial planner digital, serta embedded finance enabler.

Kejelasan standar perizinan penting agar pelaku usaha memahami persyaratan, batasan aktivitas, dan ekspektasi pengawasan. Tanpa panduan yang jelas, inovasi dapat berjalan dalam ketidakpastian dan menyulitkan perusahaan dalam merencanakan investasi, pengembangan produk, serta kepatuhan jangka panjang.

Kedua, AFTECH memaparkan roadmap penyusunan 13 panduan teknis sepanjang 2026. Enam model bisnis di bawah cakupan IAKD ditargetkan selesai pada kuartal ketiga hingga kuartal keempat 2026. Penyusunan panduan teknis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola industri secara lebih terstruktur.

OJK menyampaikan sejumlah arahan strategis, termasuk pentingnya dialog berkala antara OJK dan AFTECH, kolaborasi dalam isu keamanan siber, penyelenggaraan morning briefing reguler, serta penguatan kewenangan AFTECH dalam mendisiplinkan anggota. OJK juga membuka kemungkinan mekanisme kerja sama pemberian sanksi bersama sebagai bagian dari penguatan governance industri.

Tindak lanjut audiensi diarahkan pada penjadwalan forum dialog berkala bersama OJK IAKD. Pembahasan substansi EWA juga dilanjutkan setelah surat balasan resmi dari OJK diterima. Agenda ini memperkuat peran asosiasi sebagai jembatan antara inovasi industri dan kebutuhan pengawasan regulator.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

AFTECH Sampaikan Pandangan Market Conduct dalam Seminar LPPI



Market conduct menjadi bagian penting dari masa depan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. AFTECH berpartisipasi sebagai narasumber dalam Virtual Seminar LPPI ke 108 pada 5 Juni 2026 untuk membahas risiko reputasi, denda regulator, dan arah pengawasan perilaku pasar di industri keuangan.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menyampaikan bahwa penguatan market conduct merupakan perkembangan yang wajar dan perlu seiring besarnya skala layanan fintech kepada masyarakat. Industri fintech telah menjangkau puluhan juta pengguna melalui berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring legal, aset digital, hingga layanan berbasis data.

AFTECH memaparkan beberapa data industri. QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Outstanding pinjaman digital per Februari 2026 mencapai Rp100,69 triliun. Di sisi pengaduan, industri fintech mencatat 10.768 pengaduan konsumen melalui APPK OJK sepanjang Januari hingga April 2026. Angka ini perlu dibaca secara proporsional dengan skala layanan yang melayani jutaan pengguna dan transaksi setiap hari.

AFTECH mengidentifikasi empat area market conduct yang memerlukan perhatian. Pertama, pemasaran digital dan penggunaan influencer yang belum sepenuhnya memenuhi standar pengungkapan risiko. Kedua, transparansi biaya dan suku bunga efektif. Ketiga, kesesuaian produk dengan profil risiko pengguna. Keempat, konsistensi penanganan pengaduan.

Untuk menjawab isu tersebut, AFTECH mendorong lima agenda bersama OJK. Agenda tersebut meliputi kerangka pemasaran yang bertanggung jawab, standardisasi format disclosure, penguatan sistem penanganan pengaduan, literasi keuangan sebagai kewajiban berkelanjutan, serta penerapan compliance by design dalam perancangan produk dan proses bisnis.

Partisipasi AFTECH dalam seminar ini memperkuat pesan bahwa pertumbuhan fintech harus berjalan bersama tata kelola perilaku pasar. Perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban setelah produk diluncurkan.

Kegiatan Advokasi Kebijakan

**Focus Group Discussion:
AFTECH Bahas Konvergensi Bank dan Fintech
dalam Ekosistem Keuangan Masa Depan**

Batas antara bank dan fintech semakin bergerak menuju konvergensi. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mobile-first, kebutuhan akan layanan terintegrasi, dan perkembangan regulasi membuat masa depan industri keuangan tidak lagi dapat diprediksi sebagai persaingan antara bank dan fintech. Yang semakin penting adalah bagaimana keduanya membangun ekosistem yang saling melengkapi.

AFTECH menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk Beyond Universal Banking, Building the Future Financial Ecosystem pada 30 Juni 2026. Forum ini membahas arah ekosistem keuangan masa depan setelah UU No. 4 Tahun 2026 membuka ruang bagi bank umum untuk melakukan kegiatan usaha keuangan yang lebih luas.

Dalam diskusi, Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa bank dan fintech kini bergerak ke arah konvergensi, bukan persaingan. Bank memiliki skala usaha, basis nasabah, dan tingkat kepercayaan yang kuat. Fintech memiliki keunggulan teknologi, kecepatan inovasi, dan kemampuan menjangkau data dan segmen pengguna yang lebih beragam. Keduanya dapat saling memperkuat jika dihubungkan dalam kerangka regulasi dan tata kelola yang tepat.

Penerapan universal banking tetap memerlukan pendekatan bertahap. Kesiapan setiap bank berbeda, terutama dari sisi teknologi informasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Karena itu, perlu ada ruang transisi agar perluasan kegiatan usaha tidak hanya memperbesar cakupan layanan, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi konsumen.

Para panelis menekankan tiga faktor penentu keberhasilan ekosistem keuangan masa depan, yaitu akses, pilihan, dan kecepatan layanan bagi konsumen. Ketiganya perlu diimbangi dengan ketahanan siber, manajemen risiko, dan pengawasan yang memadai. Tanpa fondasi tersebut, integrasi layanan justru dapat meningkatkan risiko operasional dan menurunkan kepercayaan.

OJK menegaskan posisinya sebagai pendukung integrasi perizinan dan pelaporan lintas sektor, bukan penghambat inovasi. Bagi AFTECH, diskusi ini menjadi bagian dari upaya menata kolaborasi antara bank dan fintech agar mampu membangun layanan keuangan yang lebih inklusif, efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi digital.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Risk Community Bahas Strategi Anti Fraud di Era AI



Penipuan digital kini berkembang lebih cepat dan lebih terorganisir. Dengan dukungan kecerdasan artifisial, pelaku kejahatan tidak lagi hanya mengandalkan modus sederhana, tetapi mampu menciptakan identitas sintetis, memanipulasi dokumen, meniru perilaku pengguna, dan menyerang sistem verifikasi digital dengan cara yang lebih sulit untuk dideteksi.

Isu tersebut menjadi fokus Risk Community Gathering ke-8 yang diselenggarakan AFTECH bersama VIDA dan DANA Indonesia pada 19 Juni 2026. Forum ini membahas industrialisasi penipuan berbasis AI dan kebutuhan industri untuk bergeser dari strategi anti-fraud berbasis verifikasi menuju strategi berbasis intelligence. Pergeseran ini penting karena serangan tidak lagi hanya terjadi di satu titik, tetapi bergerak mengikuti celah sepanjang perjalanan pengguna.

Pendekatan yang hanya mengandalkan verifikasi identitas dinilai tidak lagi memadai. Ketika pelaku fraud dapat memanipulasi wajah, dokumen, perangkat, dan alur kamera, sistem pencegahan perlu bekerja secara lebih berlapis. Industri perlu menggabungkan verifikasi individu, perangkat, dokumen, serta sinyal perilaku yang dipantau secara berkelanjutan.

Salah satu perubahan ancaman yang menjadi perhatian adalah pergeseran dari presentation attack ke injection attack. Dalam presentation attack, pelaku berusaha menampilkan identitas palsu di depan kamera. Dalam injection attack, manipulasi dapat disisipkan langsung ke alur kamera atau sistem perangkat, sehingga serangan ini lebih sulit dikenali oleh metode verifikasi biasa.

(Bersambung ke halaman berikutnya)



Kondisi ini menuntut pendekatan anti-fraud yang lebih kolektif. Forum memunculkan usulan pembentukan collective intelligence hub sebagai wadah untuk berbagi intelijen fraud lintas institusi. Dengan berbagi pola ancaman, industri dapat mengenali modus ancaman lebih cepat, terutama ketika pelaku menggunakan metode serupa di berbagai platform.

Bagi AFTECH, fraud berbasis AI bukan hanya isu keamanan bagi masing-masing perusahaan, tetapi juga mencakup kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital secara keseluruhan. Karena itu, strategi anti-fraud perlu dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, pertukaran intelligence, dan kerangka tata kelola yang mampu mengikuti perkembangan ancaman.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Bappenas Bahas Arah Tokenisasi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Digital



Tokenisasi mulai menjadi bagian dari pembahasan strategis dalam pengembangan keuangan digital dan pembiayaan sektor riil. AFTECH menghadiri diskusi bersama Bappenas pada 8 April 2026 untuk membahas potensi, tantangan, dan arah kebijakan tokenisasi dalam pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan roadmap digitalisasi keuangan nasional, termasuk pemanfaatan tokenisasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Diskusi membahas posisi tokenisasi sebagai instrumen yang dapat menghubungkan likuiditas digital dengan sektor riil. Bappenas menempatkan tokenisasi sebagai bagian dari agenda digitalisasi keuangan yang dapat mendukung pembiayaan produktif, termasuk pertanian, UMKM, perdagangan, digitalisasi daerah, dan perikanan. Pemerintah juga mengidentifikasi 11 sektor prioritas digital dan meminta AFTECH mengkaji 3 sektor fokus utama untuk kolaborasi ke depan.

AFTECH menyampaikan sejumlah masukan strategis, termasuk perlunya insentif bagi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur digital, integrasi teknologi blockchain atau data spaces ke dalam sistem perizinan, serta pemanfaatan Digital Real Sector Launchpad sebagai sarana uji coba tokenisasi pada komoditas peternakan dan hasil pertanian.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan harmonisasi antarsektor, kesiapan infrastruktur data, interoperabilitas sistem antar kementerian dan lembaga, serta penyelarasan antara pasar modal dan ekosistem aset digital. Faktor tersebut menjadi bagian penting agar tokenisasi dapat berkembang sebagai instrumen yang mendukung transparansi, efisiensi, dan akses terhadap pembiayaan.

Dalam kegiatan pembahasan ini AFTECH diwakili oleh Firle Ganinduto, Sekretaris Jenderal AFTECH, dan Chrisma Albandjar, Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Gerei CERDAS PeKA UNS Perkuat Edukasi Transaksi Digital Aman bagi Mahasiswa



Generasi muda menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam menggunakan layanan transaksi dan keuangan digital. Bank Indonesia bersama AFTECH, ASPI, PERBANAS, dan DANA Indonesia meresmikan Gerei CERDAS PeKA di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret pada 10 April 2026 sebagai pusat edukasi perlindungan konsumen bagi mahasiswa. Gerei ini menjadi bagian dari Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen atau GEBER PK yang mendorong kolaborasi regulator, industri, asosiasi, dan institusi pendidikan.

Gerei CERDAS PeKA merupakan singkatan dari Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia Peduli, Kenali, Adukan. Program ini dirancang sebagai ruang edukasi agar mahasiswa memahami cara menjaga keamanan data pribadi, mengenali berbagai modus penipuan, dan mengambil tindakan cepat ketika menghadapi risiko dalam transaksi digital.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Anton Daryono, menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai digital native yang aktif menggunakan teknologi dan dapat menjadi agen edukasi di lingkungannya. Dengan pendekatan kolaboratif, program ini mendorong perilaku transaksi digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menilai kampus sebagai kanal strategis untuk memperluas literasi keuangan digital. Indonesia memiliki sekitar 9,9 juta mahasiswa yang tersebar di lebih dari 4.000 perguruan tinggi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar kampus sebagai ruang edukasi berkelanjutan bagi generasi muda.

(Bersambung di halaman berikutnya)



Chief of Legal and Compliance DANA Indonesia, sekaligus Ketua Departemen Sistem Pembayaran AFTECH Dina Artarini, menekankan pentingnya memperkuat pemahaman pengguna di tengah pertumbuhan transaksi digital. Data SNLIK 2025 yang dirilis OJK menunjukkan literasi keuangan nasional berada di 66,46 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Perluasan akses perlu berjalan bersama pemahaman tentang keamanan dan perlindungan diri.

Gerei CERDAS PeKA dirancang sebagai platform edukasi hybrid. Mahasiswa dapat mengakses materi perlindungan konsumen, mengikuti kampanye digital, seminar keamanan transaksi, social media challenge, kompetisi inovasi, dan diskusi interaktif bersama industri. Inisiatif ini memperkuat peran kampus sebagai pusat literasi transaksi digital yang aman.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Perkuat Literasi Fintech Daerah melalui Media Visit ke Solopos



Media regional memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman publik mengenai fintech, terutama di daerah yang memiliki basis UMKM, mahasiswa, dan pengguna layanan digital yang terus berkembang. AFTECH melaksanakan media visit ke Solopos Media Group pada 10 April 2026 untuk memperkenalkan perkembangan industri fintech dan membuka ruang kolaborasi edukasi dengan media lokal.

Solopos Media Group memaparkan profil perusahaan, cakupan audiens, serta posisinya sebagai salah satu media regional berpengaruh di Jawa Tengah dan sekitarnya. Solopos telah berkembang sebagai media multiplatform yang mencakup media daring, surat kabar, radio, serta layanan komunikasi dan konsultasi brand.

Dalam pertemuan tersebut, Indodax dan Izi Data Indonesia memperkenalkan model bisnis masing-masing. Indodax menjelaskan perannya dalam ekosistem aset digital dan edukasi kripto, sementara Izi Data Indonesia memaparkan layanan pemeringkatan kredit alternatif, analisis data, serta kontribusinya dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor keuangan digital. Penjelasan ini membantu media memahami bahwa fintech mencakup berbagai model bisnis, tidak hanya pembayaran digital dan pinjaman daring.

Solopos menyampaikan ketertarikan untuk mengangkat lebih banyak cerita mengenai inovasi fintech yang berdampak langsung bagi masyarakat daerah. Topik yang dibahas mencakup edukasi keuangan, literasi aset digital, credit scoring, keamanan transaksi, dan peran fintech bagi UMKM dan generasi muda.

Pertemuan ini membuka ruang kolaborasi lanjutan dalam bentuk liputan tematik, diskusi offline, podcast, dan kemitraan media. Kolaborasi dengan media regional dapat membantu memperluas edukasi fintech agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Finpay Bahas Penguatan Ekosistem Pembayaran Digital



Sistem pembayaran digital semakin berperan sebagai infrastruktur utama dalam ekosistem keuangan digital. AFTECH bersama Finpay menyelenggarakan AFTECH Professional Gathering and Fintech Talk pada 16 April 2026 dengan tema "From Seamless Solutions to Stronger Ecosystems, Advancing Digital Payments". Forum ini membahas arah penguatan sistem pembayaran nasional, kesiapan industri terhadap regulasi baru, serta peluang kolaborasi lintas subsektor fintech.

Diskusi menghadirkan perspektif Bank Indonesia, pelaku pembayaran digital, insurtech, P2P lending, dan multifinance. Dalam sesi keynote, Bank Indonesia memaparkan arah kebijakan sistem pembayaran nasional dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Pendekatan tersebut diarahkan pada penataan struktur industri, penguatan manajemen risiko, dan penguatan inovasi digital.

Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa nilai transaksi pembayaran digital di Indonesia telah mencapai 147,3 miliar transaksi. Skala tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pertumbuhan ini, industri perlu memperkuat kapabilitas operasional, tata kelola risiko, keamanan, dan kesiapan teknologi agar layanan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Forum turut membahas sejumlah aspek dalam PBI Nomor 10 Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif pada 31 Maret 2026 dengan masa transisi tiga tahun. Beberapa hal yang menjadi perhatian industri mencakup parameter TIKMI, klasifikasi penyelenggara sistem pembayaran, pengaturan penyelenggara penunjang, serta pengembangan infrastruktur data yang terintegrasi. Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaku fintech nonbank tetap memperoleh kesempatan yang setara, dengan tuntutan kapabilitas yang proporsional terhadap kompleksitas risiko masing-masing.

Dalam sesi panel, para pelaku industri membahas peluang inovasi seperti embedded insurance, credit shield untuk paylater, integrasi QRIS sebagai sumber dana paylater, serta pemanfaatan data transaksi pembayaran untuk credit scoring alternatif. Pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi dasar bagi inovasi produk keuangan digital.

Tindak lanjut forum diarahkan pada kesiapan anggota dalam mengevaluasi strategic business plan dan penilaian TIKMI selama masa transisi regulasi. Koordinasi dengan Bank Indonesia juga dibuka untuk pendalaman teknis bagi pelaku industri yang membutuhkan asistensi dalam implementasinya.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Kegiatan Rutin AFTECH Member Visit: Diskusi Pengembangan dan Ekosistem Aset Kripto bersama Tokocrypto



Penguatan ekosistem aset digital membutuhkan komunikasi yang konsisten antara asosiasi, pelaku industri, regulator, dan komunitas pengguna. AFTECH melakukan office visit ke Tokocrypto pada 23 April 2026 untuk meningkatkan komunikasi dengan anggota AFTECH terkait model bisnis aset digital, memperkuat pemahaman atas perkembangan industri, serta mendengarkan aspirasi anggota terkait arah regulasi dan peluang ke depan.

Dalam kegiatan visit, perwakilan Tokocrypto menyampaikan ruang kolaborasi bagi kegiatan komunitas bersama anggota AFTECH. Khususnya terkait topik diskusi advokasi tematik, atau forum edukasi literasi yang mempertemukan pelaku kripto, fintech, media, dan komunitas pengguna. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperluas pemahaman publik tentang aset digital secara bertanggung jawab.

Dari sisi advokasi, diskusi juga membahas perhatian industri terhadap isu desentralisasi kripto dalam Rancangan Perubahan UU P2SK (saat ini sudah menjadi UU No.41 2026). Posisi industri dipandang perlu dirumuskan secara jelas dan berbasis substansi akan beberapa pasal dalam UU PPSK.

Secara khusus terkait edukasi literasi, Tokocrypto juga menyampaikan bahwa memproduksi konten dan artikel edukasi mingguan yang menyasar mahasiswa dan generasi muda. Program tersebut dapat disinergikan dengan INFINITY dan AFTECH Newsletter dalam rangka mendorong perluasan literasi aset digital, terutama mengenai manfaat, risiko, pentingnya produk tata kelola, dan pentingnya keputusan investasi yang berbasis pemahaman.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dukung Rapat Pleno Fintech Startup Accelerator OJK 2026



Startup fintech membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pasar, tetapi juga kesesuaian dengan kebijakan. AFTECH berpartisipasi dalam Rapat Pleno Fintech Startup Accelerator OJK 2026 pada 29 April 2026 untuk menetapkan 10 startup terpilih dalam program bertema From Product Market Fit to Product Policy Fit.

Program ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk membantu startup memahami kerangka regulasi, kesiapan model bisnis, dan peluang masuk ke ekosistem jasa keuangan. Proses kurasi sebelumnya dilakukan pada 16 dan 17 April oleh tujuh dewan kurator dengan enam kategori penilaian utama, yaitu novelty and differentiation, economic and inclusion impact, readiness and sandbox relevance, profil founder dan governance readiness, local defensible factor, serta gender and inclusive bonus.

Dalam rapat pleno, dilakukan penetapan daftar startup dengan nilai tertinggi dan distribusi jenis inovasi yang merata. Seleksi juga dilakukan dengan orientasi program pada policy market fit.

Sepuluh startup final mencakup berbagai model bisnis, termasuk solusi rantai pasok, koperasi digital, early wage access, layanan berbasis AI, dan platform dengan dampak inklusi. Forum juga mencatat pentingnya komitmen terhadap aspek gender dan inklusi, termasuk melalui keberadaan startup dengan didirikan oleh perempuan.

OJK menegaskan bahwa akselerator ini tidak hanya menjadi ruang pengembangan bisnis, tetapi juga jalur pematangan model sebelum masuk ke mekanisme regulasi yang lebih lanjut. Untuk startup yang mendekati kesiapan sandbox, program akselerator dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk pendalaman dan penguatan tata kelola.

Peran AFTECH diharapkan berlanjut ke tahap pelaksanaan melalui pendampingan tematik. Cakupan pendampingan dapat meliputi model bisnis, akses ke ekosistem industri, kesiapan regulasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan policy market fit.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Hadiri Peluncuran PIDI DIGDAYA dan QRIS Antarnegara Indonesia Tiongkok



Penguatan talenta digital dan konektivitas pembayaran lintas negara menjadi bagian penting dari transformasi digital nasional. AFTECH menghadiri peluncuran PIDI DIGDAYA x Hackathon 2026 sekaligus soft launching QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026 sebagai bagian dari kolaborasi ekosistem antara regulator, industri, dan talenta digital.

PIDI diluncurkan sebagai platform nasional untuk mempercepat pengembangan talenta digital. Program DIGDAYA x Hackathon telah menjangkit sekitar 6.000 inovator muda dalam 2.300 tim dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 800 tim terbaik dipilih untuk mengikuti tiga tahapan program, yaitu essential training, sandboxing, dan komersialisasi.

Program ini menargetkan lahirnya minimal 80 bisnis digital pada Oktober 2026. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa PIDI tidak hanya menjadi program kompetisi, tetapi juga infrastruktur pengembangan talenta dan bisnis digital jangka panjang. Bank Indonesia menempatkan PIDI sebagai bagian dari dukungan terhadap Astacita dan Visi Indonesia Emas 2045.

(Bersambung di halaman berikutnya)



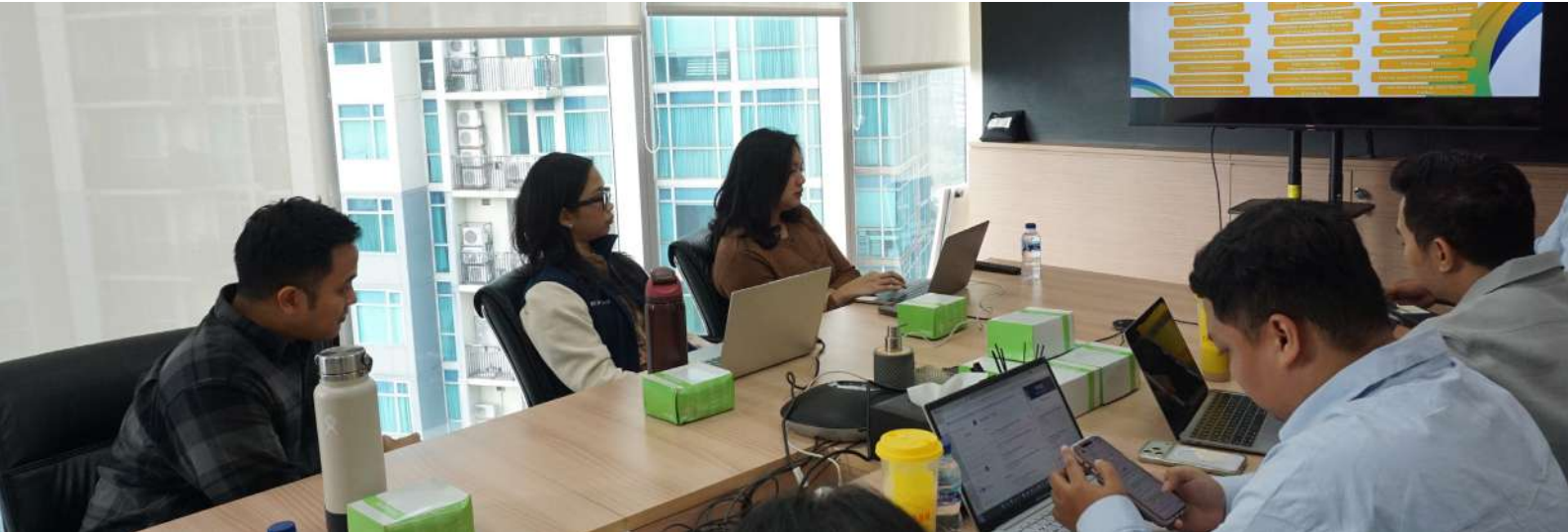
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya Indonesia menjadi pengguna sekaligus pengembang kecerdasan buatan. Ia menyampaikan tiga kunci bagi peserta, yaitu strategic visioning, strategic action, dan strategic influencing. Menko PMK, Pratikno, turut menekankan bahwa inovasi teknologi perlu membawa manfaat bagi kelompok yang lebih luas, termasuk kelompok marjinal.

Agenda strategis lainnya adalah soft launching QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok. Demonstrasi transaksi langsung menunjukkan konektivitas antara standar QR Indonesia dan standar QR Tiongkok. Inisiatif ini melengkapi koridor QR lintas negara yang telah terjalin dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.

Konektivitas QR lintas negara diharapkan dapat mendukung perdagangan bilateral, pariwisata, dan akses pasar UMKM. Bagi anggota AFTECH, program PIDJ juga membuka peluang untuk berperan sebagai mentor, instruktur, technical advisor, calon investor, atau offtaker bagi proposal yang lolos tahap sandboxing.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Easycash Bahas Perkembangan Industri LPBBTI Serta Program Literasi



Penguatan industri P2P lending membutuhkan keselarasan antara advokasi kebijakan, literasi publik, dan kolaborasi dengan para anggota. AFTECH melakukan office visit ke Easycash pada 30 April 2026 untuk membahas roadmap P2P lending, pengembangan program literasi, serta peluang kerja sama dalam edukasi keuangan digital.

Dalam diskusi, AFTECH menyampaikan pentingnya penyelarasan anggota P2P lending dengan roadmap yang sedang disusun bersama OJK. Roadmap tersebut menjadi rujukan untuk memperkuat kepatuhan, tata kelola, dan arah pengembangan industri. Easycash juga mengusulkan pembentukan task force yang dapat melibatkan fungsi legal, komunikasi, dan risiko untuk mendukung framework P2P lending secara lebih terstruktur.

Pembahasan juga mencakup rencana peluncuran Chatpindar yang bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan. Kanal edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara pinjaman daring legal dan pinjaman ilegal, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, biaya, dan risiko dalam menggunakan layanan pembiayaan digital.

Terkait program INFINITY, AFTECH dan Easycash membahas pemanfaatan data untuk menentukan lokasi penyelenggaraan yang paling tepat. Fokus diarahkan ke luar Jawa karena literasi keuangan digital di Jawa dinilai sudah lebih berkembang dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain. Pendekatan berbasis data dapat membuat program edukasi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Easycash juga menyampaikan peluang kolaborasi program FULUS dengan Kementerian UMKM. Program ini dapat menjangkau 15 sampai 20 wirausaha mikro yang merupakan borrower Easycash, dengan tujuan memperkuat kapasitas usaha, pemahaman keuangan, dan akses terhadap layanan digital yang bertanggung jawab.

Tindak lanjut diarahkan pada penyelarasan data dan rencana penyelenggaraan INFINITY, penjabaran kerja sama dengan Kemendikti dan Kementerian UMKM, serta pembahasan task force P2P lending di internal AFTECH. Peluang AFTECH menjadi panelis dalam agenda Easycash juga akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan program.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

Jakarta Fintech Connect 2026 Perkuat Jejaring Industri Keuangan Digital



Kolaborasi antarpelaku industri menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem fintech yang mandiri, bertanggung jawab, dan saling terhubung. AFTECH menyelenggarakan Jakarta Fintech Connect 2026 pada 13 Mei 2026 sebagai forum jejaring yang mempertemukan anggota AFTECH, pelaku fintech, perbankan, digital bank, startup fintech, venture capital, dan mitra teknologi.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Umum Anggota AFTECH 2026. Melalui Jakarta Fintech Connect, AFTECH membuka ruang informal namun strategis bagi pelaku industri untuk membangun hubungan, bertukar perspektif, dan menjajaki peluang kerja sama lintas subsektor.

Ekosistem fintech Indonesia mencakup berbagai model bisnis, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring legal, inovasi credit scoring, aset digital, insurtech, wealthtech, penyedia sertifikasi elektronik, hingga layanan berbasis data. Dengan keragaman tersebut, forum jejaring menjadi penting untuk memperkuat pemahaman antaranggota dan membuka peluang integrasi layanan.

Jakarta Fintech Connect juga menunjukkan peran asosiasi sebagai fasilitator kolaborasi industri. Pertemuan seperti ini membantu anggota memahami kebutuhan satu sama lain, termasuk kebutuhan teknologi, kepatuhan, pemasaran, pembiayaan, edukasi konsumen, dan ekspansi bisnis.

Dukungan dari berbagai mitra sponsor menunjukkan bahwa penguatan ekosistem fintech membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Penyedia teknologi, platform digital, lembaga keuangan, perusahaan pembayaran, dan pelaku aset digital memiliki peran masing-masing dalam membentuk layanan keuangan digital yang lebih efisien dan andal.

(Bersambung di halaman berikutnya)



Forum ini juga menjadi penghubung antara agenda kelembagaan AFTECH dan kebutuhan praktis para anggota. Setelah RUA membahas arah organisasi dan program kerja, Jakarta Fintech Connect memperkuat sisi engagement dengan membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka antar pelaku industri.

Ke depan, format jejaring seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari layanan asosiasi kepada anggota. Selain memperkuat relasi, forum tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi kolaborasi program, business matching, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan ekosistem keuangan digital yang lebih solid.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Katadata Bahas Penguatan Edukasi Publik tentang Fintech



Media memiliki peran penting dalam membantu publik memahami perkembangan fintech secara lebih utuh dan proporsional. AFTECH melakukan media visit ke Katadata pada 19 Mei 2026 untuk memperkenalkan peran asosiasi, menjelaskan perkembangan ekosistem keuangan digital, serta membuka peluang kolaborasi edukasi publik dengan media.

Dalam kunjungan tersebut, AFTECH menyampaikan bahwa fintech tidak hanya berkaitan dengan pinjaman daring legal atau pindar. Fintech merupakan ekosistem layanan keuangan digital yang mencakup sistem pembayaran, inovasi credit scoring, insurtech, penyedia sertifikasi elektronik, wealthtech, aset digital, dan berbagai model bisnis lain yang saling mendukung inklusi keuangan nasional.

Perwakilan anggota dari sektor pindar turut menjelaskan perkembangan industri, termasuk akumulasi penyaluran pinjaman yang telah mencapai lebih dari Rp1.388 triliun, lebih dari 169 juta borrower aktif yang terlayani, serta sekitar 38 sampai 40 persen pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Data ini menunjukkan bahwa pindar berkontribusi terhadap akses pembiayaan, terutama bagi segmen yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Kunjungan ini juga menjadi ruang dialog mengenai pentingnya edukasi publik yang lebih masif. Redaksi Katadata menyarankan agar penyelenggara pindar lebih proaktif menjelaskan perkembangan industri, termasuk manfaat, risiko, tata kelola, serta perbedaan antara layanan legal dan ilegal. Edukasi tersebut penting agar informasi yang diterima publik tidak hanya bersumber dari regulator atau isu yang sedang berkembang.

AFTECH melihat media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi keuangan digital. Melalui kolaborasi dengan media, industri dapat menjelaskan inovasi, perlindungan konsumen, kontribusi ekonomi, dan tantangan yang dihadapi secara lebih seimbang.

Tindak lanjut pertemuan diarahkan pada pembahasan potensi kolaborasi dengan Katadata, termasuk media partnership dalam flagship event AFTECH dan keterlibatan sebagai narasumber pada platform audiovisual. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman publik tentang fintech yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Delegasi CAEDA serta GDTTC Bahas Kerja Sama Digital Indonesia Tiongkok



Kerja sama lintas negara di sektor digital membuka peluang bagi pengembangan pembayaran lintas batas, tokenisasi, pencegahan penipuan (anti-scam), dan pembiayaan sektor riil. AFTECH menerima audiensi delegasi CAEDA dan GDTTC pada 20 Mei 2026 untuk membahas potensi kerja sama strategis antara ekosistem fintech Indonesia dan Tiongkok.

Pertemuan ini membahas momentum positif interoperabilitas QR antara Bank Indonesia dan People's Bank of China yang diluncurkan pada 30 April 2026. Integrasi QR lintas negara dapat mendukung transaksi masyarakat, perdagangan, pariwisata, dan UMKM. Dalam diskusi, kedua pihak melihat perlunya dialog industri sebagai pelengkap integrasi teknis yang dipimpin oleh bank sentral.

Pembahasan juga mencakup transisi dari pinjaman P2P menuju model berbasis lembaga atau institutional-to-peer. Pengalaman Tiongkok dalam mengelola siklus industri P2P dinilai relevan bagi Indonesia, terutama terkait tata kelola, moral hazard, perlindungan konsumen, dan arsitektur regulasi pembiayaan digital yang sedang berkembang.

GDTTC Capital Center turut memaparkan rencana dana pengembangan industri bilateral senilai RMB 2 miliar dengan struktur awal yang melibatkan China dan Indonesia. Dana tersebut masih dalam tahap penjajakan dan menyasar sektor manufaktur maju, agrikultur, ekonomi hijau, serta perdagangan digital. Agenda ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana fintech dapat mendukung pembiayaan sektor riil dan investasi lintas negara.

AFTECH juga mengundang delegasi untuk berpartisipasi dalam Indonesia Digital Bank Summit 2026 dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026. Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kerja sama, membahas peluang konkret, dan memperluas jejaring antara pelaku industri kedua negara.

Komunikasi lanjutan difokuskan pada pembayaran lintas batas, tokenisasi dan real-world asset, pertukaran pengetahuan terkait transisi P2P ke I2P, serta anti-penipuan dan perlindungan konsumen. Potensi pengumuman kolaborasi akan dijajaki untuk disampaikan dalam forum industri fintech yang akan datang.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Garuda TV Jajaki Kolaborasi Edukasi Keuangan Digital



Kolaborasi dengan media nasional menjadi bagian penting dari upaya memperluas literasi publik tentang fintech. AFTECH melakukan media visit ke Garuda TV pada 22 Mei 2026 untuk memperkenalkan peran asosiasi, menjelaskan perkembangan ekosistem keuangan digital, dan membuka peluang kerja sama dalam edukasi publik.

Dalam pertemuan ini, AFTECH menyampaikan posisinya sebagai asosiasi resmi industri fintech Indonesia di hadapan regulator dan publik. AFTECH menaungi 208 perusahaan anggota dengan lebih dari 25 model bisnis, mulai dari pembayaran digital, pinjaman daring legal, penyedia sertifikasi elektronik, aset digital, insurtech, wealthtech, hingga layanan berbasis data.

Perwakilan anggota AFTECH dari Privy dan Easycash turut memperkenalkan perkembangan perusahaan masing-masing. Kehadiran anggota membantu media melihat bahwa fintech mencakup berbagai layanan, tidak hanya satu subsektor. Privy mewakili aspek identitas dan tanda tangan digital, sementara Easycash menjelaskan peran pindar dalam pembiayaan digital yang legal dan diawasi.

AFTECH dan Garuda TV mengidentifikasi kepentingan bersama dalam mengedukasi publik mengenai keuangan digital yang sehat dan terpercaya. Edukasi ini penting karena adopsi layanan digital terus meningkat, sementara masyarakat masih membutuhkan pemahaman tentang keamanan data, perlindungan konsumen, risiko produk, dan cara membedakan layanan legal dari layanan ilegal.

Pertemuan ini juga membuka peluang keterlibatan AFTECH sebagai narasumber dalam program Garuda TV terkait isu fintech. Media televisi dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat yang belum sepenuhnya terpapar edukasi keuangan digital melalui kanal komunitas atau media sosial.

Tindak lanjut diarahkan pada pertemuan lanjutan untuk membahas potensi kolaborasi, termasuk kemitraan media dalam kegiatan unggulan AFTECH dan pelibatan narasumber dalam program Garuda TV. Kerja sama seperti ini dapat memperkuat komunikasi publik yang lebih mudah dipahami, faktual, dan relevan bagi masyarakat.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan Harian Kompas Bahas Narasi Fintech yang Lebih Utuh



Narasi publik mengenai fintech masih sering berhenti pada pinjaman daring. Padahal, ekosistem keuangan digital Indonesia jauh lebih luas dan mencakup berbagai model bisnis, mulai dari sistem pembayaran, innovative credit scoring, insurtech, penyelenggara sertifikasi elektronik, wealthtech, aset digital, hingga layanan berbasis data. Kesenjangan pemahaman ini perlu dijembatani agar publik dapat melihat fintech secara lebih proporsional.

Wakil Sekretaris Jenderal I, Chrisma Albandjar, bersama perwakilan anggota dari kluster LPBBTI atau pindar, yaitu Yonathan Gautama dari Samir, Silvi dari AdaKami, Tanti Senjaya dari PinjamDuit, Mikhal Anindita dari JULO, Paska Denberia dari Easycash, serta Yulvina Napitupulu dari Indosaku, bergabung dalam kunjungan ke redaksi Harian Kompas pada 9 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman tersebut. Pertemuan ini tidak hanya menjadi agenda media relations, tetapi juga ruang untuk membangun narasi industri yang lebih berbasis data, lebih komprehensif, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Salah satu tantangan utama fintech adalah persepsi. Ketika publik hanya mengenal fintech dari satu subsektor, kontribusi model bisnis lainnya menjadi kurang terlihat. Padahal, setiap model memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sistem pembayaran membantu efisiensi transaksi, inovasi credit scoring mendukung penilaian risiko yang lebih inklusif, sementara penyelenggara sertifikasi elektronik memperkuat identitas digital dan keabsahan transaksi.

Perwakilan anggota dari sektor pendanaan berbasis teknologi informasi turut menyampaikan perkembangan industri. Akumulasi penyaluran pinjaman telah melampaui Rp1.388 triliun, dengan lebih dari 169 juta borrower yang telah dilayani. Sekitar 38 hingga 40 persen dari total pembiayaan juga disalurkan kepada UMKM.

Data tersebut menunjukkan kontribusi pembiayaan digital terhadap akses keuangan, terutama bagi segmen yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, data saja tidak cukup. Industri juga perlu lebih aktif menjelaskan perbedaan antara layanan legal dan ilegal, mekanisme perlindungan konsumen, tata kelola risiko, serta kanal pengaduan yang tersedia.

Bagi AFTECH, kolaborasi dengan media menjadi bagian dari strategi untuk membangun kepercayaan publik. Narasi fintech yang lebih utuh akan membantu masyarakat memahami bahwa keuangan digital bukan hanya soal akses cepat, tetapi juga tentang keamanan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH dan ASPI Bahas Arah Pengembangan Produk Pembayaran Digital



Industri pembayaran digital di Indonesia memasuki fase yang semakin kompleks. Pertumbuhan pengguna, merchant, dan ragam layanan membuat inovasi tidak lagi hanya diukur dari kecepatan adopsi, tetapi juga dari kemampuan industri untuk menjaga keamanan, interoperabilitas, dan kualitas manajemen risiko. Dalam konteks ini, pengembangan produk pembayaran digital perlu berjalan seiring dengan penguatan standar dan tata kelola.

AFTECH bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia menyelenggarakan workshop pengembangan produk sistem pembayaran digital pada 23 Juni 2026. Forum ini membahas arah pengembangan produk, kesiapan industri, serta peran regulasi dalam memastikan inovasi pembayaran tetap aman dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Bank Indonesia menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama industri pembayaran digital. Akses pelaku usaha ke depan akan semakin dipengaruhi oleh kapabilitas manajemen risiko melalui instrumen Tingkat Kesehatan dan Manajemen Risiko Industri (TIKMI). Instrumen ini mengevaluasi lima dimensi, yaitu transaksi, interkoneksi, manajemen risiko, kompetensi, dan teknologi. Hasil perhitungan awal menunjukkan sekitar 50 persen pelaku memiliki skor TIKMI di bawah 4, sehingga membutuhkan action plan perbaikan yang lebih kuat.

(Bersambung di halaman berikutnya)



Di sisi produk, Bank Indonesia memaparkan peta jalan inovasi yang mencakup Cross-Border Payment Mechanism, pembaruan standar SNAP, Online Trading Secure, serta eksplorasi biometric payment berbasis vein recognition. Arah ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran bergerak menuju layanan yang semakin terhubung, aman, dan berbasis teknologi autentikasi yang lebih maju.

ASPI juga menyampaikan perkembangan QRIS yang tumbuh lebih dari 111 persen, dengan lebih dari 59 juta pengguna dan 42 juta merchant. Pengembangan lanjutan mencakup QRIS Tap, wearable payment, dan biometric payment. Seluruh pengembangan produk dianjurkan merujuk pada panduan SILA milik ASPI agar inovasi berjalan dalam standar yang terarah.

Bagi AFTECH, agenda ini menegaskan bahwa regulasi perlu dipahami sebagai enabler inovasi. Inovasi pembayaran digital akan semakin kuat jika didukung oleh keamanan berlapis, penetration testing berkala, audit tahunan, serta komitmen industri untuk meningkatkan kualitas dan teknologi terkait risiko.

Kegiatan Pengembangan Komunitas

AFTECH Dorong Peran Fintech sebagai Enabler Pembangunan Berkelanjutan



Transformasi digital semakin terkait dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Fintech tidak lagi hanya dipandang sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai enabler yang dapat memperluas akses, mendukung UMKM, dan menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi yang lebih produktif. Peran ini menjadi semakin penting ketika inklusi keuangan perlu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi sektor riil.

AFTECH berpartisipasi dalam Global Sustainable Development Congress 2026 pada 24 hingga 25 Juni 2026. Dalam forum internasional ini, AFTECH menyampaikan perspektif mengenai peran fintech sebagai katalis pembangunan ekonomi inklusif melalui peningkatan akses keuangan, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi lintas sektor.

Pada sesi mengenai transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan, AFTECH menekankan bahwa teknologi perlu ditempatkan sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Akses keuangan digital hanya akan berdampak jika dapat membantu individu dan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

AFTECH juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara inovasi dan tata kelola. Transformasi digital yang bertanggung jawab membutuhkan tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen, pengelolaan data, dan tata kelola kecerdasan artifisial. Tanpa fondasi tersebut, inovasi berisiko bergerak lebih cepat daripada kapasitas masyarakat dan institusi dalam mengelolanya.

Dalam sesi penutup bersama Tech for Good Institute, AFTECH menegaskan bahwa trust dan governance merupakan fondasi utama bagi inovasi digital yang berkelanjutan. Literasi keuangan juga tetap menjadi tantangan besar. Masyarakat tidak hanya perlu memiliki akses terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga memahami manfaat, risiko, biaya, dan hak sebagai konsumen.

Ke depan, pengembangan fintech perlu semakin terintegrasi dengan sektor riil seperti UMKM, pertanian, manufaktur, dan logistik. Integrasi ini penting agar inovasi keuangan digital tidak berhenti pada transaksi, tetapi benar-benar mendukung produktivitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kegiatan Pengurus

AFTECH Bahas Peran Earned Wage Access untuk Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Akses pekerja terhadap upah yang telah diperoleh dapat menjadi bagian dari solusi kesejahteraan finansial yang lebih preventif. AFTECH memfasilitasi diskusi terbatas antara anggota di bidang Earned Wage Access dan Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Arsjad Rasjid, pada 14 April 2026 untuk membahas perkembangan model bisnis EWA, kebutuhan pemahaman industri, serta peluang advokasi kepada pemangku kepentingan ketenagakerjaan dan dunia usaha.

Diskusi ini mempertemukan penyelenggara EWA dalam naungan AFTECH, termasuk pelaku yang telah bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan akses upah fleksibel bagi pekerja. Forum membahas posisi EWA sebagai layanan yang berbeda dari kredit konvensional. EWA berbasis pada upah yang sudah diperoleh pekerja, tidak mengenakan bunga, dan dirancang sebagai layanan berbasis biaya, bukan produk pinjaman.

Model EWA dinilai dapat membantu pekerja mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa harus bergantung pada sumber pembiayaan informal atau layanan pinjaman berbiaya tinggi. Bagi perusahaan, layanan ini juga dapat menggantikan proses kasbon manual dengan sistem pencatatan yang lebih terstruktur, sekaligus menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan karyawan.

Para pelaku EWA menyampaikan bahwa adopsi layanan ini membutuhkan pemahaman yang lebih luas di tingkat perusahaan, regulator, dan publik. Mekanisme payroll deduction masih memerlukan penyesuaian di sejumlah perusahaan karena berkaitan dengan sistem HR, proses administratif, dan aspek hukum ketenagakerjaan. Dengan penjelasan yang tepat, EWA dapat diposisikan sebagai solusi komplementer yang mendukung manajemen keuangan pekerja, bukan sebagai instrumen pembiayaan.

(Bersambung di halaman berikutnya)



AFTECH melihat ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai EWA melalui komunikasi yang lebih konsisten. Narasi utama perlu menekankan bahwa EWA bekerja atas dasar upah yang telah menjadi hak pekerja, sehingga berbeda dari layanan pinjaman. Pendekatan ini penting agar perusahaan dan pekerja dapat memahami manfaat, batasan, serta tata kelola layanan tersebut.

Tindak lanjut diskusi diarahkan pada penyusunan *one-pager* mengenai EWA untuk disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan serta menjadi bahan advokasi kepada dunia usaha. Surat rekomendasi resmi juga disiapkan untuk menjelaskan positioning EWA sebagai referensi bagi anggota penyelenggara.

Kegiatan Pengurus

Rapat Dewan Pengawas AFTECH Bahas Evaluasi 2025 dan Arah Program 2026



Tata kelola asosiasi membutuhkan evaluasi berkala agar program kerja tetap selaras dengan mandat organisasi dan kebutuhan anggota. AFTECH menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas pada 24 April 2026 untuk membahas evaluasi pelaksanaan program 2025 serta arah dan rencana kerja tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AFTECH, Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan sebelum Rapat Umum Anggota untuk menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan organisasi. Dalam rapat tersebut, Dewan Pengawas menerima penjelasan dari perwakilan Dewan Pengurus Harian, yaitu Sekretaris Jenderal AFTECH, mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi sepanjang tahun 2025, termasuk capaian program, engagement anggota, advokasi kebijakan, literasi keuangan digital, serta kerja sama dengan regulator dan mitra industri.

Pembahasan juga mencakup prioritas program 2026. Arah kerja asosiasi difokuskan pada penguatan peran AFTECH sebagai wadah industri keuangan digital, peningkatan kualitas layanan bagi anggota, perluasan kolaborasi lintas sektor, serta penyelarasan program dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pasar. Agenda ini penting karena ekosistem fintech terus berkembang dengan model bisnis yang semakin beragam.

Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menyampaikan paparan mewakili Dewan Pengurus Harian mengenai rencana program kerja dan prioritas asosiasi. Setelah memperoleh penjelasan tersebut, Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Dewan Pengurus Harian dan Sekretariat untuk mempertajam fokus program 2026, terutama agar agenda asosiasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada manfaat yang lebih terukur bagi anggota dan industri. Arahan Dewan Pengawas mencakup penguatan advokasi kebijakan, literasi keuangan digital, kolaborasi dengan sektor riil, peningkatan kapasitas anggota, serta tata kelola organisasi.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat menyesuaikan rencana program kerja berdasarkan arahan Dewan Pengawas. Program prioritas yang telah dibahas akan dioperasionalkan sesuai timeline yang disepakati, dengan mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur sepanjang tahun.

Penyusunan Annual Member Survey

AFTECH Finalkan Proses Penyusunan Annual Members Survey (AMS) Bersama Regulator dan Pemerintah



Validasi temuan industri membutuhkan dialog langsung dengan regulator dan kementerian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih relevan dengan agenda kebijakan nasional. AFTECH menyelenggarakan FGD Sesi 5 Annual Member Survey 2025 dan 2026 pada 5 Juni 2026 sebagai penutup rangkaian validasi AMS bersama regulator dan kementerian lembaga.

Forum ini menjadi ruang dialog antara AFTECH, OJK, Bank Indonesia, Satgas PASTI, BSSN, Komdigi, dan sejumlah pemangku kepentingan lain. Pembahasan berfokus pada temuan AMS, arah pengawasan inovasi, perlindungan konsumen, pembiayaan produktif, serta peran fintech dalam pembangunan daerah.

OJK IAKD menegaskan pendekatan sandbox 2.0 dengan exit strategy yang lebih jelas. Pendekatan ini bertujuan memastikan inovasi dapat masuk ke industri secara tertib, disertai penguatan kelembagaan, fit and proper, serta pengawasan berbasis risiko yang tidak bersifat one size fits all.

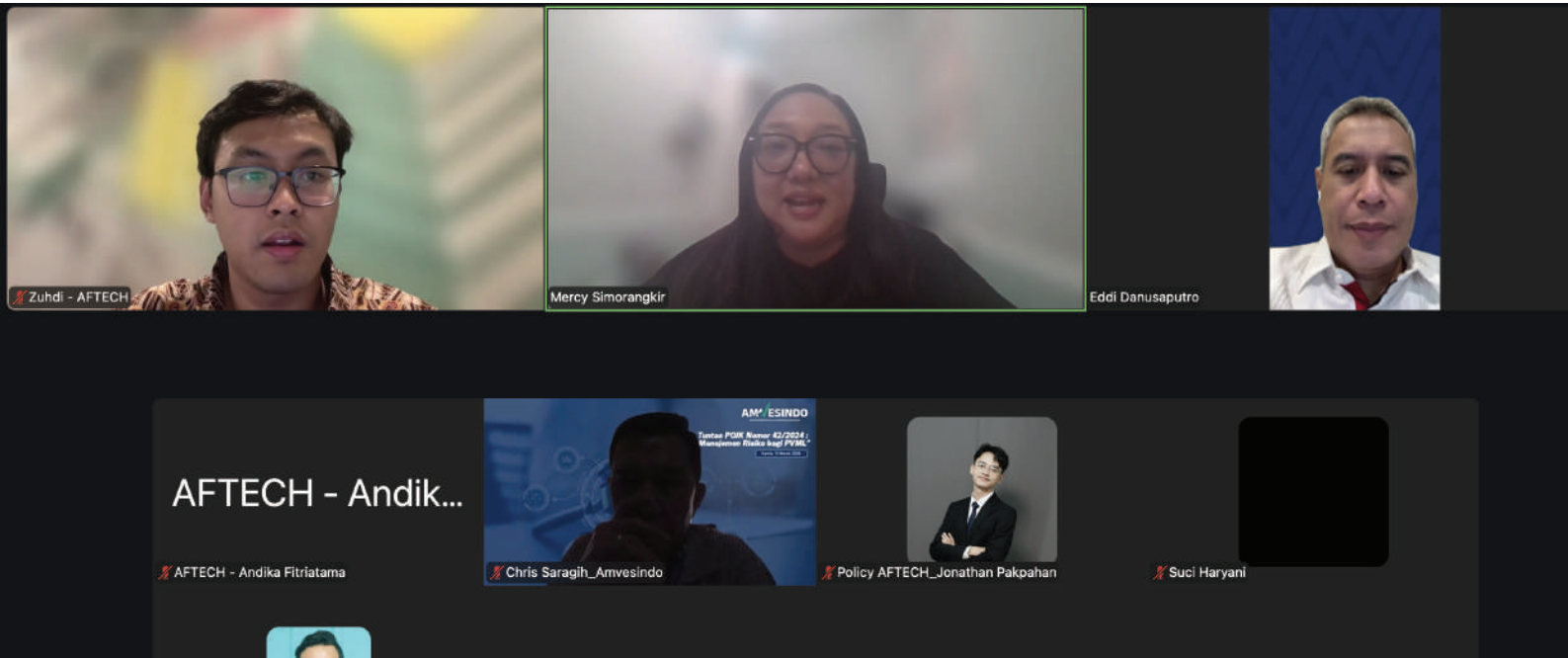
Bank Indonesia menyampaikan bahwa risiko perlindungan konsumen kini bergeser dari gangguan operasional menuju manipulasi pengguna berbasis social engineering. Eksperimen sosial BI menunjukkan bahwa rasa takut menjadi salah satu pintu masuk dominan dalam penipuan digital. Temuan ini memperkuat kebutuhan edukasi konsumen yang lebih kontekstual dan berbasis perilaku.

Satgas PASTI juga mendorong kolaborasi cepat lintas otoritas, industri, dan telekomunikasi, termasuk pembangunan repository data, daftar putih, dan kampanye publik bersama. Sementara itu, OJK PVML memaparkan arah Roadmap Pindar atau LPBBTI 2023 sampai 2028 yang menargetkan peningkatan pembiayaan produktif dan UMKM secara bertahap hingga kisaran 50 sampai 70 persen.

Bappenas mendorong penyelarasan fintech dengan agenda pembangunan daerah, termasuk akses keuangan sebagai indikator kinerja daerah di 333 kabupaten dan kota. Forum ini memperkuat posisi AMS sebagai basis data industri untuk mendukung advokasi, kolaborasi lintas sektor, dan penyusunan arah kebijakan fintech yang lebih terukur.

Penyusunan Annual Member Survey

AFTECH dan AMVESINDO Bahas Perspektif Investor atas Temuan AMS



Perkembangan fintech perlu dibaca tidak hanya dari sisi pelaku industri, tetapi juga dari perspektif investor dan modal ventura. AFTECH menyelenggarakan FGD Sesi 2 Annual Member Survey 2025 dan 2026 bersama AMVESINDO pada 3 Juni 2026 untuk membahas temuan survei dari sudut pandang pendanaan, valuasi, dan ekosistem investasi.

AMVESINDO menilai bahwa meningkatnya proporsi anggota yang tidak mencari pendanaan baru mencerminkan kematangan industri. Sebanyak 61 persen anggota tidak lagi mencari pendanaan eksternal. Pergeseran ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan fintech mulai fokus pada profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan yang lebih terkendali.

Forum juga membahas perubahan pola pendanaan. Peran venture capital turun dari 45 persen menjadi 31 persen, sementara investor strategis korporat naik menjadi 34 persen. Pergeseran ini dinilai konsisten dengan karakter industri keuangan yang terlisensi, di mana kemitraan strategis, akses pasar, dan kepatuhan menjadi semakin penting dalam pengembangan bisnis.

AMVESINDO menyoroti keterbatasan opsi exit sebagai salah satu tantangan utama ekosistem startup Indonesia. Tanpa jalur exit yang jelas, minat investasi dapat tertahan. Salah satu opsi jangka panjang yang dibahas adalah institutional fund berbasis dana pensiun, asuransi, dan university endowment, dengan pembelajaran dari pendekatan Malaysia melalui Khazanah.

Isu inklusivitas juga menjadi perhatian. Lebih dari 60 juta masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp3 juta berisiko kehilangan akses pinjaman digital jika pembatasan regulasi tidak disertai solusi alternatif. Dalam konteks ini, innovative credit scoring, central fraud database, dan penguatan know your business menjadi agenda penting.

Diskusi ini memperkuat pemahaman bahwa pertumbuhan fintech tidak dapat dipisahkan dari ekosistem investasi, regulasi, dan kepercayaan pasar. Masukan investor menjadi bahan penting bagi AFTECH dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan industri.



RUA AFTECH 2026 Tegaskan Tata Kelola sebagai Fondasi Tech Champions Indonesia

Asosiasi Fintech Indonesia menggelar Rapat Umum Anggota 2026 pada 12 Mei 2026 sebagai forum organisasi tertinggi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. RUA tahun ini mengemban dua agenda utama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban serta laporan keuangan tahun 2025, sekaligus persetujuan rencana program kerja dan anggaran AFTECH tahun 2026.

RUA AFTECH 2026 menjadi momentum konsolidasi bagi industri fintech yang terus berkembang dengan model bisnis yang semakin beragam. Forum ini dihadiri 144 perusahaan anggota AFTECH dan menghasilkan keputusan bulat atas seluruh agenda yang ditetapkan. Seluruh agenda tersebut bergerak di bawah tema kerja AFTECH tahun 2026, yaitu Memperkuat Tata Kelola, Menjaga Kepercayaan, dan Menata Arah Kebijakan Masa Depan Industri Fintech Indonesia.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak tech champions. Namun, ambisi tersebut perlu dibangun di atas tata kelola yang kuat. Dalam sambutannya, Pandu menyampaikan bahwa responsible innovation dan good governance bukan hambatan bagi inovasi, melainkan fondasi agar inovasi dapat bertahan dan memberi dampak jangka panjang.

1 Tata Kelola sebagai Fondasi Pertumbuhan



“Kalau kita ingin industri ini naik kelas, maka seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha harus step up. Integrate. Collaborate. Move faster. Kita membangun industri yang tidak hanya tumbuh cepat, tetapi tumbuh dengan cara yang dipercaya dan memberi dampak nyata bagi sektor riil Indonesia,” ujar Pandu.

Dari sisi regulator, Ketua Dewan Komisiner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyoroti perkembangan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang dinaungi AFTECH. Saat ini, AFTECH menaungi 208 perusahaan anggota. Ekosistem ini juga mencatat 17,17 juta pengguna Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, 77,32 juta hit Pemeringkat Kredit Alternatif, serta Rp2,11 triliun transaksi yang difasilitasi PAJK.

Friderica menekankan bahwa pertumbuhan industri perlu dibangun dengan fondasi yang benar. Ia menyampaikan tiga arahan untuk memperkuat kontribusi AFTECH dan industri ITSK, yaitu memperkuat inklusi yang bertanggung jawab, membangun kepercayaan melalui integritas dan tata kelola, serta menyeimbangkan inovasi dan regulasi.

“Regulasi kami tidak memadamkan inovasi yang dilakukan, tetapi justru menyeimbangkan inovasi, faktor bisnis dan perlindungan terhadap konsumen,” ungkap Friderica.

2 Fintech sebagai Penggerak Indonesia Emas



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan peran fintech dalam mendukung agenda Indonesia Emas. Menurutnya, fintech dapat menjadi fasilitator transformasi digital dan arah kebijakan sektor keuangan melalui akses pembiayaan, alternatif sumber pembiayaan, serta peningkatan efisiensi transaksi.

“Kita perlu mendorong fintech untuk membantu mewujudkan Indonesia Emas, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau kami tidak percaya fintech, tidak percaya AFTECH, kita tidak bisa tumbuh lebih cepat, kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi, kita tidak bisa tumbuh lebih merata,” ujar Rachmat.

Wakil Menteri Keuangan, Junda Agung, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Ia menilai AFTECH memiliki posisi strategis untuk tidak hanya menjadi representasi industri, tetapi juga penjaga kepercayaan publik melalui transparansi, penegakan kode etik, dan perlindungan konsumen.

“Saya ingin mengajak kita untuk membuat lari fintech Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berdampak. Industri fintech harus mampu menjaga kepercayaan publik di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menguat,” pesan Junda.

3 Kolaborasi untuk Arah Kebijakan Masa Depan



Dalam rangkaian RUA ini, AFTECH juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Hong Kong Web3.0 Standardization Association. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan ekosistem keuangan digital dan Web3.

RUA AFTECH 2026 menegaskan arah asosiasi untuk memperkuat tata kelola industri, menjaga kepercayaan publik, dan menata kebijakan masa depan fintech Indonesia. Dengan forum anggota yang solid dan dukungan pemangku kepentingan strategis, AFTECH memperkuat perannya sebagai rumah bersama bagi ekosistem keuangan digital yang inklusif, inovatif, dan bertanggung jawab.



Setelah Inklusi Keuangan, Saatnya Memperkuat Ekosistem Pemulihan Finansial



Artikel Member

Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam memperluas inklusi keuangan melalui transformasi digital. Proses pengajuan pembiayaan kini berlangsung jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan beberapa tahun lalu, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal. Pencapaian ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan patut diapresiasi sebagai keberhasilan bersama seluruh pelaku ekosistem.

Namun, seiring semakin matangnya industri, muncul tantangan baru yang mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat, yaitu ketika kondisi keuangan berubah dan kemampuan memenuhi kewajiban finansial menurun. Dalam situasi tersebut, pembahasan sering kali langsung berfokus pada penagihan atau restrukturisasi, padahal terdapat satu fase yang sama pentingnya tetapi masih jarang menjadi perhatian, yaitu proses pemulihan finansial.

Berdasarkan pengalaman Dolpheen Indonesia mendampingi masyarakat yang menghadapi kesulitan pembayaran, tantangan terbesar sering kali bukan hanya persoalan kemampuan membayar, melainkan kebingungan menentukan langkah pertama. Banyak orang tidak mengetahui pilihan penyelesaian yang tersedia, kepada siapa harus berkomunikasi, maupun bagaimana menyusun prioritas ketika menghadapi tekanan finansial. Ketidakpastian tersebut kerap membuat situasi menjadi semakin berat, baik secara finansial maupun psikologis.

Karena itu, pemulihan finansial perlu dipahami sebagai proses yang lebih menyeluruh daripada sekadar melanjutkan pembayaran. Dalam praktiknya, proses ini membutuhkan pendekatan multidisiplin yang dapat mencakup edukasi keuangan, pendampingan komunikasi, mediasi, hingga dukungan psikologis sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Pendekatan seperti ini membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih rasional dan menjalani proses penyelesaian kewajiban dengan arah yang lebih jelas.

Pendekatan pemulihan yang terstruktur juga memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisinya, sementara proses komunikasi dengan penyedia layanan keuangan dapat berlangsung lebih konstruktif. Pada akhirnya, peluang penyelesaian kewajiban secara berkelanjutan menjadi lebih besar karena setiap pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat kembali memiliki kemampuan memenuhi tanggung jawab finansialnya.

Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, Dolpheen Indonesia memandang bahwa pemulihan finansial bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pelaku industri, pendamping profesional, tenaga psikologi, edukator keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat memiliki jalur yang lebih jelas ketika menghadapi tekanan finansial. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang terciptanya proses pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kematangan sebuah ekosistem keuangan digital tidak hanya diukur dari seberapa cepat masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan, tetapi juga dari seberapa siap ekosistem tersebut membantu mereka ketika menghadapi kesulitan. Setelah berhasil memperluas inklusi keuangan, langkah berikutnya adalah memperkuat ekosistem pemulihan finansial agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memiliki jalur yang jelas untuk kembali bangkit ketika menghadapi tantangan finansial.

CYBER RESILIENCE IN THE AI ERA:

Securing Financial Services from Code to Data

AI is transforming financial services—driving intelligent experiences, automating operations, and accelerating software delivery. At the same time, it is reshaping the cyber risk landscape.

Cybersecurity is no longer just an IT priority—it's a business imperative that underpins customer trust, regulatory compliance, and long-term resilience.



A HOLISTIC APPROACH TO CYBER RESILIENCE



AI CREATES NEW OPPORTUNITIES

From intelligent customer experiences to automated operations and faster software delivery.



RISKS ARE MULTIPLYING

New applications, cloud workloads, APIs, and AI models increase the number of identities, secrets, and sensitive data to protect.



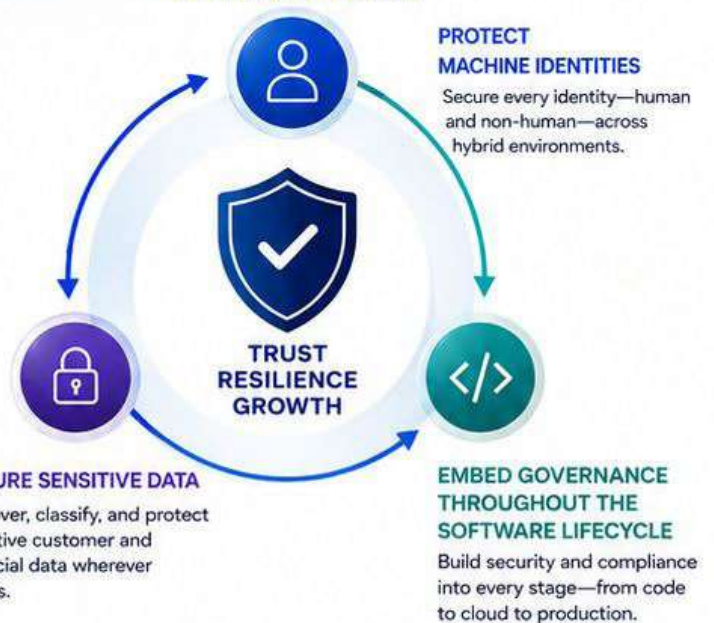
CYBERSECURITY IS A BUSINESS IMPERATIVE

For financial institutions, cybersecurity underpins customer trust, regulatory compliance, and long-term resilience.



A HOLISTIC APPROACH IS KEY

Leading organizations protect machine identities, secure sensitive data, and embed governance throughout the software lifecycle to innovate without increasing risk.



EXECUTIVE PRIORITIES



SECURE AI AND CLOUD-NATIVE APPLICATIONS AT SCALE

Protect modern applications, APIs, and AI models across multi-cloud and hybrid environments.



PROTECT SENSITIVE CUSTOMER AND FINANCIAL DATA

Safeguard data throughout its lifecycle to maintain privacy, compliance, and customer trust.



STRENGTHEN GOVERNANCE ACROSS HYBRID ENVIRONMENTS

Unify visibility, policy, and controls to reduce risk and meet regulatory expectations.



BUILD RESILIENCE WHILE ACCELERATING DIGITAL TRANSFORMATION

Drive innovation with confidence by embedding security into every decision.



DOWNLOAD THE EXECUTIVE GUIDE

Cyber Resilience in the AI Era: Securing Financial Services from Code to Data

Learn how leading organizations are strengthening cybersecurity from application development through data protection while preparing for an AI-driven future.



EXPLORE MORE IBM CISO Hub

VISIT NOW

ibm.com/campaign/ciso-hub?ink=mkt9pb



DOWNLOAD THE EXECUTIVE GUIDE

DOWNLOAD NOW

ibm.com/forms/mkt-53830?ink=mkt1pb



Protect what matters most.
Safeguard every identity, application and piece of data.



Build trust and resilience.
Strengthen customer trust and ensure business continuity.



Accelerate with confidence.
Innovate faster while staying secure and compliant.





”Adopsi Web3 Melalui Inovasi Tokenisasi Saham Di Indonesia” Artikel Oleh Tokocrypto

Sektor *Real World Assets* (RWA) saat ini menjadi pendorong utama pertumbuhan Web3 global. Platform aset digital yang berlisensi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), **Tokocrypto** memperluas pasar melalui **Tokenized Stocks**, inovasi tokenisasi saham yang menjembatani pasar modal tradisional dengan teknologi blockchain untuk akses investasi saham global yang inklusif, transparan, dan aman di Indonesia.

Secara global, pasar tokenized stocks tumbuh eksponensial dengan lonjakan kapitalisasi pasar 400% menjadi US\$1,7 miliar pada akhir Juni 2026 dari US\$329 juta setahun sebelumnya. Aktivitas on-chain tercatat masif dengan TVL menembus US\$1,36 miliar dan lebih dari 256.000 pemegang token, didukung penguatan volume perdagangan mingguan sebesar 56,7% hingga US\$459 juta.

Di Indonesia, Tokocrypto memimpin pasar dengan volume perdagangan tokenized stocks mencapai 152.227 USDT pada Juni 2026 dari 6 listing aset awal. Capaian ini memposisikan Tokocrypto sebagai katalis infrastruktur, edukasi, dan adopsi Web3 domestik.

Peluncuran tokenized stocks mempertegas komitmen Tokocrypto dalam mendukung industri Web3 nasional melalui kepatuhan regulasi, jaminan aset 1:1, dan kemudahan akses untuk memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi global berbasis blockchain.

Disclaimer: Investasi aset digital berisiko tinggi dan nilai aset dapat berfluktuasi. Lakukan riset mandiri serta pahami risiko sebelum berinvestasi.

Sumber & Referensi Redaksi: Tokocrypto Research, Binance Research, A16z Research, CoinMarketCap Research, Tokonews

TANGGAL BERLAKU
04 MEI 2026

Jasa Keuangan Non-Bank

ILB TERKAIT

- [Penguatan Tata Kelola LKM: OJK Terbitkan Kerangka Rencana Bisnis dan Laporan Rea...](#)
- [Perombakan Tata Kelola Administrasi Program Pensiun Terkait Negara di Depan Mata...](#)
- [Rancangan Peraturan OJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan: Penyeder...](#)
- [OJK Perkuat Kerangka Asuransi Kesehatan: Perusahaan Asuransi Dapat Menerapkan Pe...](#)
- [Kewajiban Perizinan, Persetujuan dan Pelaporan bagi Perusahaan Pergadaian Diperl...](#)

**Klik Disini Untuk
Versi Bahasa Inggris**

Perusahaan Pembiayaan Hadapi Pengetatan Ketentuan Buy Now Pay Later: Pemeriksaan Wajib Usia dan Penghasilan Debitur Berlaku Efektif pada Juli 2026



Peraturan baru ini memperketat kerangka regulasi yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah (secara bersama-sama disebut ?Perusahaan?) yang menyelenggarakan layanan Buy Now Pay Later (?BNPL?) melalui penerapan kewajiban skor kredit, ambang batas kelayakan debitur, batas kemampuan pembayaran, serta kewajiban yang diperkuat terkait Pelindungan Data Pribadi (?PDP?). Perusahaan juga wajib memberikan pengungkapan tambahan pada saat onboarding mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mematuhi ketentuan pelaporan dan tata kelola yang lebih ketat, serta menyiapkan dokumentasi yang komprehensif untuk memperoleh persetujuan operasional. Ketentuan wajib mengenai kelayakan debitur tersebut akan mulai berlaku sepenuhnya pada 1 Juli 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner OJK [No. 2 Tahun 2026](#) (“**PADK OJK 2/2026**”) tentang Penyelenggaraan *Buy Now Pay Later* (“**BNPL**”)^[1] bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (secara bersama-sama disebut “**Perusahaan**”). PADK OJK 2/2026 ini akan menjadi kerangka pelaksanaan dari Peraturan OJK [No. 32 Tahun 2025](#) (“**POJK 32/2025**”) dan mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan layanan BNPL.^[2]

Lampiran PADK OJK 2/2026 secara komprehensif mengatur berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan dalam penyelenggaraan layanan BNPL, termasuk kriteria kelayakan debitur yang spesifik serta berbagai pembatasan terkait kemampuan membayar kembali yang wajib diterapkan. PADK OJK 2/2026 juga menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh Perusahaan yang mengajukan persetujuan kepada OJK, serta sekaligus menguraikan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan terkait penetapan batas maksimum manfaat ekonomi, serta pemrosesan data debitur.

PADK OJK 2/2026 secara resmi mulai berlaku pada 4 Mei 2026.^[3]

Skor Kredit dan Kelayakan Debitur

Berdasarkan POJK 32/2025, baik bank umum maupun Perusahaan diperkenankan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman internal masing-masing yang digunakan untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan BNPL yang diminta.^[4] Namun, PADK OJK 2/2026 kini membatasi fleksibilitas tersebut dengan mewajibkan penerapan skor kredit. Dalam hal ini, Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap calon debitur memenuhi persyaratan sebagai berikut:^[5]

1. Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah; dan
2. Memiliki penghasilan bruto minimum sebesar Rp3.000.000 per bulan.

Perlu dicatat pula bahwa persyaratan kelayakan sebagaimana diuraikan di atas yang berlaku bagi calon dan/atau debitur eksisting akan mulai berlaku sepenuhnya pada 1 Juli 2026, baik untuk akuisisi debitur baru maupun perpanjangan fasilitas pembiayaan.^[6]

PADK OJK 2/2026 memperbolehkan Perusahaan untuk menggunakan data kredit historis tradisional maupun model *machine learning* yang canggih untuk memprediksi penghasilan dan kelayakan pembayaran debitur.^[7] Dalam melakukan penilaian kelayakan debitur, Perusahaan dapat memperoleh data baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan pengelola informasi pihak ketiga yang berwenang serta instansi pemerintah, dengan ketentuan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi (“**PDP**”).^[8]

PADK OJK 2/2026 juga mewajibkan Perusahaan untuk menerapkan batasan risiko strategis tertentu (misalnya, membatasi pembiayaan bagi debitur yang telah memiliki pinjaman aktif pada lebih dari tiga penyedia lainnya).^[9] Selain itu, Perusahaan wajib melakukan verifikasi atas keaslian seluruh dokumen yang disampaikan dan secara hukum berkewajiban untuk menerbitkan pemberitahuan resmi yang memuat alasan spesifik atas setiap permohonan yang ditolak.^[10]

PADK OJK 2/2026 juga menetapkan batas ketat atas kemampuan membayar kembali debitur sebagai bagian dari proses skor kredit, di mana debitur dibatasi untuk menggunakan maksimum 40% dari pendapatannya untuk pembayaran hingga tahun 2028.^[11] Kemampuan membayar kembali yang diperkenankan tersebut selanjutnya akan diturunkan menjadi batas 30% pada tahun 2029.^[12]

PDP dan Kewajiban Pengungkapan

POJK 32/2025 sebelumnya hanya mewajibkan Perusahaan untuk menerapkan prinsip umum PDP serta memberikan informasi administratif dasar terkait sumber pendanaan dan frekuensi cicilan.^[13] Namun, PADK OJK 2/2026 secara signifikan memperketat ketentuan tersebut dengan membatasi pengambilan data perangkat secara eksklusif pada fungsi kamera, lokasi, dan mikrofon, setelah persetujuan tegas terlebih dahulu diperoleh dari calon dan/atau debitur eksisting.^[14] Selama tidak terdapat pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Perusahaan dilarang membagikan data transaksi atau data keuangan apa pun kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan terpisah yang terdokumentasi dari calon dan/atau debitur eksisting yang bersangkutan.^[15]

PADK OJK 2/2026 juga mengatur secara rinci proses *onboarding*, di mana Perusahaan kini wajib menampilkan peringatan risiko dalam huruf kapital pada tahap registrasi, serta secara tegas memberitahukan pengguna bahwa transaksi mereka akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pengungkapan tersebut juga harus mencantumkan peringatan kepada pengguna bahwa setiap wanprestasi atau gagal bayar dapat berisiko menyebabkan pemblokiran akses terhadap jenis layanan keuangan lainnya.^[16]

Manfaat Ekonomi

POJK 32/2025 sebelumnya memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi atas layanan BNPL yang diselenggarakan oleh Perusahaan,^[17] sementara PADK OJK 2/2026 yang baru secara tegas mendefinisikan manfaat ekonomi tersebut sebagai total akumulasi seluruh biaya yang dibebankan kepada debitur. Perhitungan tersebut harus mencakup secara komprehensif tingkat

bunga dasar atau margin yang relevan, komisi administrasi dan *platform*, serta biaya asuransi atau biaya tambahan lainnya yang berlaku.^[18]

PADK OJK 2/2026 juga mewajibkan Perusahaan untuk menghitung tingkat suku bunga yang mendasari dengan menggunakan *effective interest method*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tingkat yang dilaporkan secara akurat mencerminkan imbal hasil aktual yang diperoleh selama seluruh tenor pembiayaan.^[19]

Lebih lanjut, Perusahaan juga wajib melaporkan total manfaat ekonomi tersebut dalam bentuk nilai nominal secara langsung kepada OJK. Pelaporan berkala ini harus dilakukan sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam ketentuan pelaporan kepatuhan bulanan wajib yang berlaku bagi Perusahaan konvensional maupun syariah.^[20]

Prosedur untuk Memperoleh Persetujuan

POJK 32/2025 secara umum mensyaratkan bahwa perusahaan pembiayaan hanya dapat menyelenggarakan layanan BNPL setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan operasional dari OJK.^[21] Sehubungan dengan hal tersebut, PADK OJK 2/2026 kini mewajibkan Perusahaan untuk mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan setidaknya 10 jenis dokumen pendukung, yang mencakup antara lain:^[22]

1. Informasi umum mengenai layanan BNPL yang ditawarkan (misalnya nama, fitur, model bisnis, atau karakteristik produk BNPL);
2. Manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan layanan BNPL (baik bagi Perusahaan yang bersangkutan maupun debitur);
3. Mekanisme atau metode pembiayaan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan layanan BNPL;
4. Analisis Perusahaan serta identifikasi risiko pelaksanaan BNPL (misalnya identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko tersebut, serta upaya mitigasinya); dan
5. Uraian mengenai mekanisme kerja sama kemitraan yang digunakan dalam pelaksanaan layanan BNPL.

PADK OJK 2/2026 juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk meminta penyampaian laporan hasil audit independen oleh pihak ketiga guna memverifikasi kecukupan keamanan sistem elektronik milik pemohon yang bersangkutan. Selain itu, penilaian independen tersebut juga dapat diwajibkan untuk memastikan bahwa karakteristik produk BNPL yang relevan telah sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta standar operasional yang diakui.^[23]

Poin Penting

PADK OJK 2/2026 menetapkan rezim regulasi yang komprehensif untuk layanan BNPL yang kini berlaku bagi Perusahaan, serta memperkenalkan persyaratan minimum pendapatan dan usia, batas penggunaan kapasitas pembayaran, dan standar verifikasi wajib bagi calon debitur. PADK OJK 2/2026 juga memberikan penekanan yang lebih besar pada kepatuhan PDP, keterbukaan pengungkapan kepada nasabah, serta akurasi perhitungan dan pelaporan manfaat ekonomi yang telah ditetapkan kepada OJK oleh Perusahaan.

Pelaku usaha yang beroperasi sebagai Perusahaan disarankan untuk meninjau dan menyesuaikan kembali kerangka manajemen risiko BNPL internal mereka, termasuk parameter penyaringan debitur, metodologi penilaian kemampuan pembayaran, serta mekanisme pemrosesan data berbasis persetujuan (*consent-based*). Pelaku usaha juga perlu memperbarui kebijakan internal, memperkuat proses *onboarding* nasabah, dan menyelesaikan peninjauan kesiapan kepatuhan sebelum penerapan penuh persyaratan kelayakan debitur yang akan berlaku pada Juli 2026.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Peraturan ini, silakan akses AI Assistant kami - [Allex](#), atau jadwalkan *virtual consultation* dengan tim analis atau *practice leaders* kami melalui laman [workspace](#) anda. (KS)

^[1] Layanan BNPL merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa (Pasal 1 [1], POJK 32/2025 dan Bagian I.5, Lampiran, PADK OJK 2/2026).

^[2] Bagian “Menimbang” dan untuk informasi lebih lanjut mengenai POJK 32/2025, lihat ILB [No. 5290](#).

^[3] Pasal 3, PADK OJK 2/2026.

^[4] Pasal 6 (1), POJK 32/2025.

^[5] Bagian VI.3.b.4, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[6] Pasal 2, PADK OJK 2/2026.

^[7] Bagian VI.4 dan VII.5, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[8] Bagian VII.3 - VII.4, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[9] Bagian VI.6, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[10] Bagian VI.3 dan VI.7, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[11] Bagian VII.2.a, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

^[12] Bagian VII.2.b, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

- [13] Pasal 8 dan 11, POJK 32/2025.
- [14] Bagian V.1, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [15] Bagian V.3, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [16] Bagian VIII.1 dan VIII.4, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [17] Pasal 15, POJK 32/2025.
- [18] Bagian XI.2, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [19] Bagian XI.3, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [20] Bagian XI.4 - XI.5, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [21] Pasal 2 (3), POJK 32/2025.
- [22] Bagian IV.1 - IV.2, Lampiran, PADK OJK 2/2026.
- [23] Bagian IV.3, Lampiran, PADK OJK 2/2026.

Publikasi ILB Sebelumnya

- [Sistem Perizinan Berbasis Risiko Baru di Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal Resmi Berlaku: Sanksi Administratif Bertahap atas Ketidakpatuhan](#)
- [Integrasi Digital UMKM Dimulai: SAPA UMKM Memusatkan Klasifikasi, Skoring, dan Fasilitas Pemerintah](#)
- [Peringatan bagi Industri Tembakau: Tembakau Iris, Tembakau Kunyah, Molases, dan Tembakau Hirup Resmi Dikecualikan dari Pajak Rokok](#)
- [Persetujuan Kehutanan Dirombak: Validasi Baseline Wajib Kini Diperkenalkan untuk Penentuan Batas Area Kerja](#)
- [Pemerintah Perkenalkan Strategi untuk Mempertahankan Kapal berbendera Indonesia dalam Posisi Daftar Putih pada MoU Tokyo](#)

Indonesian Legal Brief adalah layanan PT Justika Siar Publika pemilik dan operator www.hukumonline.com dan pro.hukumonline.com

PT Justika Siar Publika, AD Premier Office Park 9th floor
Jl TB. Simatupang No.5 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

untuk berlangganan, hubungi +62-21-2270 8910 atau
fax ke +62-21 2270 8909 atau e-mail ke
marketing@hukumonline.com

untuk e-mail masukan costumer@hukumonline.com

Manajer Riset dan Analisis Hukum: Sinatrya Primandhana | **Editor:**
Simon Pitchforth, Kautsar Singadipoera, Nabila Rieska, Marcell
Sihombing, Astari Utami | **Analisis:** Rifda Lutfianingtyas, Hemi Lavour,
Belle Risca | **Manajer Kepustakawan:** Dedi Rosyadi

Seluruh isi data dan informasi dalam layanan ini merupakan kompilasi dari sumber-sumber terpercaya. Setiap usaha telah dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan data dan informasi dalam layanan ini. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian. Layanan ini tidak dimaksudkan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat atau opini hukum. Tidak disarankan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ada pada layanan ini tanpa mencari layanan profesional terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanggapan atau memerlukan lebih lanjut

*mengenai layanan kami, silahkan menghubungi kami di customer@hukumonline.com seluruh hak cipta. seluruh hak cipta
PT. JUSTIKA SIAR PUBLIKA 2026*

THE INDONESIAN FINTECH ASSOCIATION MEMBERSHIP

Indonesia Fintech Association (AFTECH) is an association that represents over 300 digital financial services institutions in Indonesia. We're the largest and the first fintech association in the country, established in 2016. As of right now, our members represent over 25 digital finance business models in the country. In 2019 AFTECH was officially appointed by the Indonesia Financial Services Authority as the Association for Digital Financial Innovation. That means the association is also a partner for OJK in developing a healthy digital finance ecosystem in Indonesia that supports the creation of financial inclusion.

AFTECH Members Registration Process



AFTECH Membership Categories



Benefits of AFTECH Membership



Membership Registration:

Register via the QR code shown here or via the link, <https://www.fintech.id/id/register/form>

Address:

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman No.86, Kota Jakarta Pusat, 10220

Join us to support financial inclusion by increasing access, use, and quality of financial services.

For more information, please contact:

Abynprima Rizki (Director of External Engagement and Membership)
Email: abyn.rizki@fintech.id
Rafaa Karimah (Community Development & Compliance Associate)
Email: rafaa.karimah@fintech.id

Upgrade Kompetensi Tim Anda Bersama **AFTECH Academy**



**DAFTAR TRAINING SEKARANG!
Tersedia:
Public Class dan In-House Class**

★ Most Requested Training



APU-PPT & PPPSM

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme



CIPDPO

Certified Indonesian
Personal Data Officer



**Internal Audit &
Preventing Fraud**



SPPUR

Sistem Pembayaran dan
Pengelolaan Uang Rupiah

SCAN QR DISINI



Download Katalog Lengkap

Scan QR Code untuk mendapatkan katalog
lengkap AFTECH Academy.

1

Scan QR
Code



2

Download
Katalog PDF



**Contact Us For
More Information**

✉ info@fintech.id

☎ +62 819-0101-0222

EXPAND YOUR BUSINESS BEYOND BORDERS WITH AFTECH XPANSION DESK



DAFTAR KONSULTASI SEKARANG!
AFTECH Xpansion Desk Siap Membantu
Ekspansi Bisnis Anda ke Pasar Global

★ Layanan Kami



Market Entry Strategy

Strategi masuk ke pasar baru yang tepat dan efektif



Business Matching & Networking

Koneksi dengan mitra, investor, dan pemangku kepentingan



Regulatory & Government Support

Pendampingan regulasi dan akses ke dukungan pemerintah setempat



Expansion Acceleration

Dukungan end-to-end untuk mempercepat pertumbuhan bisnis anda

SCAN QR DISINI



Download Katalog Lengkap

Scan QR Code untuk mendapatkan katalog lengkap AFTECH Xpansion Desk.

1

Scan QR Code



2

Download Katalog PDF



**Contact Us For
More Information**

Contact Person:
Rafaa Karimah - Community Development AFTECH

+62 851-2137-4770
rafaa.karimah@fintech.id



Asosiasi Fintech Indonesia

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence,
Jl. Jenderal Sudirman No.86 2nd floor,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

 www.fintech.id

 [fintech.id](https://www.tiktok.com/fintech.id)

   [fintechid](https://www.facebook.com/fintechid)

 [Asosiasi Fintech Indonesia](https://www.youtube.com/AsosiasiFintechIndonesia)